



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI  
DENGAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI RI**

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke-</b>           | : 2022-2023<br>: IV<br>: --   |
| <b>Jenis Rapat</b>                                       | : Rapat Kerja   |
| <b>Sifat Rapat</b>                                       | : Terbuka   |
| <b>Hari &amp; Tanggal Rapat Waktu Rapat Tempat Rapat</b> | : Senin, 10 April 2023<br>: 10.40 s.d. 13.40 WIB<br>: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III<br>Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. |
| <b>Ketua Rapat</b>                                       | : DR. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.<br>(Ketua Kom II/F-PG)   |
| <b>Acara Rapat</b>                                       | : 1. Pembahasan terkait penyelesaian Tenaga Honorer secara menyeluruh; dan<br>2. Isu-isu Aktual lainnya.  |
| <b>Sekretaris Rapat</b>                                  | : Mahmud, S.E.<br>(Kabag Set. Komisi II DPR RI)   |
| <b>Hadir</b>   | : 41 dari 49 orang Anggota dengan rincian:  |

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN:**

1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung  
(Ketua/F-PG)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.  
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. H. Yanuar Prihatin, M.Si.  
(Wakil Ketua/F-PKB)
4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.  
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

**11 orang Anggota dari 11 Anggota:**

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. Riyanta
5. H. Heru Sudjatmoko
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. Ir. Hugua
8. M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.
9. H. Yadi Srimulyadi
10. H.M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
11. Hj. Aida Muslimah

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

**6 orang Anggota dari 7 Anggota:**

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
3. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

**5 orang Anggota dari 7 Anggota:**

1. Drs. Difriadi
2. Drs. Supriyanto
3. Andika Pandu Purgabaya, S.Psi., M.Si.
4. Prasetyo Hadi
5. Ir. Irwan Ardi Hasman

**4. FRAKSI NASDEM:**

**1 orang Anggota dari 2 Anggota:**

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**2 orang Anggota dari 3 Anggota:**

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H. Haruna, M.A., M.B.A.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

**5 orang Anggota dari 5 Anggota:**

1. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
2. H. Mohammad Muraz, M.M.
3. H. Zulkifli Anwar
4. Rezka Oktoberia
5. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**

**4 orang Anggota dari 4 Anggota:**

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
4. KH. Aus Hidayat Nur

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

**3 orang Anggota dari 4 Anggota:**

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Khairul Muhtar, SE., M.M.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

**0 orang Anggota dari 1 Anggota:**

-

**B. LEMBAGA NEGARA:**

1. Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Abdullah Azwar Anas, S.PD., S.S., M.Si.):

**JALANNYA RAPAT :**

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Kita mulai ya Pak.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**ANGGOTA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullah.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Selamat pagi,  
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran,  
Yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Pertama-tama tentu kita kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama tugas dan tanggung jawab pengawasan dalam keadaan *sehat wal'afiat*.

Rapat-rapat di Komisi II sampai nanti akhir dari bulan ramadhan ini masih dilaksanakan secara *hybrid*. Jadi ada yang hadir secara fisik dan hadir secara virtual. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita dan saya sebetulnya menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1), peraturan tata tertib DPR RI.

Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40)**

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih pada Saudara Menteri yang hadir pada hari ini memenuhi undangan kami. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya ingin menawarkan sekaligus meminta persetujuan kepada kita semua tentang agenda rapat dan waktu rapat kita.

Yang pertama, agenda kita sebetulnya fokus terkait tentang masalah penyelesaian tenaga honorer, ya. Kecuali kalau ada hal yang lain kita bisa berkembang. Apa kita bisa setuju?

**ANGGOTA RAPAT:**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Setuju ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Kemudian saya menawarkan paling lama kita selesai pukul 12.00 WIB.

**ANGGOTA RAPAT:**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Kalau kurang nanti kita tambah.

**ANGGOTA RAPAT:**

Setuju.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Setuju?

Baik.

**(RAPAT: SETUJU)**

Sebelum saya persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasannya. Saya ingin menyampaikan satu hal saja, ya. Ini berkaitan dengan soal internal kami di DPR, ya.

Jadi selama ini kita ngurusin institusi yang lain, tapi juga ternyata harus menyelesaikan urusan internal kita. Ini soal Sekretariat Jenderal DPR Pak, Pak Menteri. Ya, jadi sudah beberapa kali sebetulnya kami memfasilitasi rapatnya, dan ada Pak Sekjenya di sini. Jadi, karena tahu bahwa rapat dengan Menteri, datang lagi tadi. Makanya kita rapat dulu di situ sebentar, ya.

Dan sudah berkali-kali juga kami sampaikan, termasuk dengan Bu Sekjen ini. Setiap saya ketemu sama Bu Sekjen, selalu apa namanya saya

sampaikan dan selalu jawabannya baik-baik saja, ternyata *enggak*, belum baik-baik juga sudah bertahun-tahun ini, begitu. Belum kelar-kelar.

Terakhir disampaikan ini ada surat dari Menteri yang sebelumnya, Almarhum Mas Cahyo, soal penolakan terkait dengan Tukin. *Nah* nanti teman-teman juga akan menyampaikan.

Intinya begini. Saudara Menteri juga pernah menjadi Anggota DPR sini. Jadi apa yang dirasakan oleh teman-teman sebagian kali ini, bahwa *enggak* bisa dipaksain ya, struktur atau dan yang lain-lain itu antara di DPR dengan di tempat yang lain, begitu. Karena ini di dalam, nanti Undang-Undang ASN pun kita mau pertegas itu.

Mungkin dalam pengelolaan ASN di negara kita ini harus harus dibagi mana ya eksekutif, legislatif, mau pun yudikatif, begitu ya. Jadi kalau misalnya Tukin itu tidak disesuaikan terus gara-gara memang harus dipaksakan adanya penyederhanaan birokrasi ya di DPR ini, ya itu *enggak* mungkin terjadi. Karena kalau itu dilakukan, semua fungsi pelayanan yang ada di DPR ini akan akan terganggu, begitu.

Iya, jadi itu, poinnya itu. Jadi tolong juga Kementerian PAN-RB itu bisa memahami itu. *Nah*, detailnya nanti harusnya *enggak* perlu beberapa, berkali-kali difasilitasi begitu. Nanti Pak Sekjen ketemu lagilah dengan ibu-ibu di sana itu, ya dituntasin. Kalau *enggak* tuntas ngomong lagi ke kita apa masalahnya, begitu. Karena setiap mau rapat dengan Menteri PAN-RB, pasti Bapak-Bapak ini lapor ke kita. Sudah berapa kali. Jadi ini ini yang saya kira juga tolong di apa namanya di-*response* dengan cepat dan dicari solusinya seperti apa, begitu. *Nah*, ini ini pesan sebelum kita mulai membicarakan tentang masalah tenaga honorer. Nanti silakan kalau teman-teman tadi yang ikut rapat juga juga menyampaikan.

*Nah* selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasannya.

Silakan Pak.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.Si.):**

Baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi,  
Salam sejahtera buat kita semua,  
*Om swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan,

Saudara Ketua, para Wakil Ketua,  
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,  
Bapak/ibu sekalian dari tim Kemen PAN-RB, dan  
Seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini,  
Terutama Anggota Dewan, baik yang hadir langsung maupun yang hadir secara  
*daring*,

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Atas nama Kementerian PAN-RB, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR yang selalu memberikan dukungan terkait dengan penyelesaian terkait tenaga *non-ASN*.

Sebelum kami melanjutkan ini, nanti Ibu Rini dan tim dari Kesekjenan mungkin perlu duduk, karena terkait dengan eselon. Menghidupkan eselon III dan eselon II ini bisa tapi sangat terbatas, karena kalau dihidupkan akan menjadi *preseden* di beberapa tempat lain, tapi nanti khususnya seperti apa. Saya minta nanti Bu Nanik dan tim untuk bisa duduk bersama dengan tim Kesekjenan.

Ibu dan Bapak yang saya hormati,

Kalau serius menyampaikan *slide* ini di mana kita bergerak untuk reformasi berdampak. Karena arahan Bapak Presiden bagaimana birokrasi ini bisa lebih lincah dan ke depan dampak ini menjadi penting.

Oleh karena itu, maka arahan Bapak Presiden ini terus menjadi *slide* kami yang kami sampaikan kepada teman-teman di berbagai daerah bahwa kita mesti bekerja yang berdampak.

*Outline* dari kegiatan ini:

Pertama, seperti disampaikan oleh Pimpinan adalah penyelesaian tenaga honorer.

Yang kedua, isu-isu aktual lainnya, dan nanti jika diperlukan ada beberapa lampiran ketika ada pertanyaan dari Bapak/Ibu sekalian akan kami sampaikan.

Pertama terkait dengan penyelesaian tenaga honorer.

Komitmen pemerintah dalam penanganan *non-ASN*, kalau kita lihat sejak 2005, kemudian 2012, 2017, sampai 2018, di mana ada seleksi CPNS bagi eks THK II tahun 2016 Nakes dan tenaga pendidikan, kemudian lulus dari eks THK-II ada 6.812, kemudian sisanya itu kita lihat di nomor 14 Bapak/Ibu sekalian, di siklus itu sisanya adalah 444.687.

Kemudian ada PP 49 tahun 2016 terdapat larangan pengangkatan *non-ASN*. Itu nomor 4.

Kemudian nomor 5, Permenpan-RB 2019 di mana seleksi THK II lulus 35.361, sisanya 410.110. Kemudian seleksi PPPK bagi dosen dan tenaga pendidik PTNB 2.854 dan penyuluh pertanian THL 11.590.

Kemudian di nomor 6 ada Permenpan-RB 27 tahun 2001, di mana seleksi CPNS PPPK, JF guru, dan JF *non* guru, kemudian saat menseleksi ada 51.492 THK II, JF guru.

*Nah*, sisanya itu THK II 378.880. Ini dari dari BKN 10 September 2022.

Bapak/ibu sekalian yang kami hormati,

Kemudian nomor 7, ada SE Menpan-RB nomor 185, 151 tahun 2022 di mana ada pendataan *non*-ASN. Jadi pendataan *non*-ASN ini bukan berarti mereka di data untuk dijadikan ASN. Jadi ini pendataan, ternyata yang mestinya tinggal 378.000, setelah kita data menjadi 2,3 juta *non*-ASN. Padahal jelas ada aturan yang tidak boleh mengangkat *non*-ASN.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Atas masukan dari Pimpinan Dewan, dari pertemuan beberapa kali, kemarin ada pertimbangan, penyelesaian tenaga *non* ASN, yaitu *guiding principle*. Berdasarkan masukan dari pimpinan dan *stakeholder* yang beberapa kali bertemu dengan kami.

Pertama, prinsip kita harus menghindari PHK masal. Karena kalau undang-undang itu kita jalankan, seperti yang tadi kami sampaikan, maka akan ada pemberhentian masa. Kemudian hindari pembengkakan anggaran.

Yang kedua, atas saran dari Anggota Dewan dan seluruh *stakeholder*. Tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini.

Dan yang keempat, sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik, mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM dan aparatur sipil negara, dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara yang termasuk tenaga *non* ASN dan *eks*-THK II untuk berkompetisi menjadi ASN.

Bapak/ibu yang saya hormati,

Inilah dasar hukum tata kelola manajemen ASN, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di PP Nomor 49 tahun 2014 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Di Pasal 96 jelas bahwa PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai *non* PNS dan/atau *non* PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Jika tetap mengangkat akan dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan.



Pasal 99. Pegawai *non* PNS dan/atau *non* PPPK masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Undang-Undanganya jelas, mestinya tinggal 400.000, tapi naik menjadi 2,3 juta.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Inilah pemetaan tenaga *non* ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ada surat Permenpan RB tanggal 3 Desember 2002 mengingatkan PPK instansi terkait melarang pengangkatan *non* ASN dan memberikan arahan, melakukan pemetaan, menghapus jenis kepegawaian; tenaga seperti pengemudi, kebersihan, *security* dilakukan *outsourc*e, menyusun langkah strategis penyelesaian *non* ASN.

Kemudian dari Surat Menpan RB Juli 2022, memberikan arahan PPK instansi untuk melakukan pendataan *non* ASN, disertai dengan SPTJM, disampaikan kepada aplikasi pendataan *non* ASN BKN.go.id. Ini untuk pendataan *non* ASN dimaksudkan agar pemetaan dan mengetahui jumlah pada instansi pusat dan daerah bukan untuk pengangkatan menjadi ASN.

Sekali lagi. Pendataan bukan untuk pengangkatan menjadi ASN.

Bapak/Ibu sekalian,  
Pak Ketua,

Dapat kami laporkan, inilah hasil pendataan tenaga *non* ASN, Pak Ketua. Rincian tenaga *non* ASN:

- Jumlah tenaga *non* ASN menjadi 2.360.723;
- Eks THK II itu ada 180.128;
- Non eks THK II ada 2.180.595;
- Tenaga pendidik ada 73.462;
- Tenaga kesehatan ada 205.299;
- Penyuluh ada 74.000;
- Teknis ada 610.000;
- Tenaga administrasi kurang lebih 738.000;
- 131.193 jabatan tidak sesuai dengan syarat pada surat 151; Contoh: pengemudi, kebersihan, dan sebagainya.
- 8.159 *non* ASN bekerja di bawah 1 tahun.

Yang berikutnya adalah *upload* SPTJM sesuai dengan surat BKN 2023 tanggal 14. Aplikasi dibuka kembali untuk 120 instansi atas arahan kita yang belum menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang diberikan sampai 31 Maret 2023.

Intansi yang telah mengunggah atau *upload* dari 599 instansi dengan rincian intansi pusat 66, instansi daerah 529, sehingga total tenaga *non* ASN yang sudah dilengkapi SPTJM sebanyak 2.355.092 orang. Dan sampai dengan saat ini terdapat 5 instansi yang SPTJM-nya masih dalam proses.

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati,  
Pak Ketua,

Koordinasi pendataan tenaga *non* ASN. Ini BKN berkoordinasi terus untuk melengkapi SPTJM, kemudian BPKP, kami minta untuk melakukan audit data, di mana Surat Menpan RB kepada Kepala BPKP, melalui Surat Nomor B-411 2023, 27 Februari 2023 untuk melakukan audit data yang disampaikan kepada aplikasi pendataan *non* ASN.

Pak Ketua dan saudara sekalian yang kami hormati,

Pembentukan tim percepatan penyelesaian terus kami dorong, sehingga dengan demikian kami mendapatkan masukan, dan mereka telah resmi juga kami masukkan menjadi tim, selain dari Kementerian PAN-RB, dari BKN, Asosiasi Pemerintah Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten, dan Apkasi. Kami terus duduk untuk mencari solusi yang terbaik.

*Nah*, langkah tindak lanjutnya adalah:

1. Perlu kesepahaman bersama terkait dengan penyelesaian tenaga *non* ASN *eks*-THK II, khususnya prinsip dasar yang harus disepakati, sehingga memiliki pedoman dalam mengambil solusi alternatif yang tepat dan adil.
2. Perlu kesepakatan terkait dengan langkah kebijakan yang harus disusun dalam menyelesaikan tenaga *non* ASN *eks*-THK II secara alternatif rencana guna mengantisipasi berakhirnya status tenaga *non* ASN atau *eks* tenaga honorer pada 28 November 2023.
3. Perlu dukungan semua pihak agar iklim birokrasi tetap baik dengan membangun opini bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian tenaga *non* ASN atau *eks*-THK II secara adil, kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara.

Dan atensi tidak lanjut RUU perubahan Undang-Undang ASN yang juga sedang diproses. Dan harapan kami Pak Ketua Rapat, ini perlu mendapatkan atensi yang cukup, karena kita akan memberikan langkah-langkah dan upaya penyelesaian dalam jangka panjang. Dan harapan kami ke depan ini, kalau ini bisa segera kita apa proses bersama, akan banyak hal yang akan bisa membuat birokrasi jauh lebih efisien dan langkah-langkahnya akan jauh lebih lincah.

Isu aktual lainnya adalah terkait dengan penerapan reformasi birokrasi tematik, menerjemahkan harapan Bapak Presiden, sehingga dengan demikian RB kita ke depan tidak lagi menjadi tumpukan kertas untuk meningkatkan nilainya, tapi kalau penanganan kemiskinannya terukur, peningkatan investasinya mereka meningkat terukur, dan juga terkait dengan belanja produk dalam negeri dan inflasi penanganannya bagus, maka RB-nya mereka nanti akan naik.

Inilah penyederhanaan reformasi birokrasi, fokus dampak kinerja bukan lagi di administrasi. Jadi kalau kemarin orang untuk mendapatkan nilai RB ya, itu fokus pada aspek hulu tata kelola internal birokrasi cenderung administratif, ke depan fokusnya pada aspek hilir, di mana menyelesaikan problem kerakyatan dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik.

Kalau kemarin harus menjawab 259 komponen pertanyaan untuk mendapatkan nilai RB dan mengunggah ribuan dokumen, *nah* sekarang kita menghitung 26 dampak indikator. Jadi yang berdampak terkait dengan kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, inflasi, dan sebagainya.

Yang berikutnya Pak Pak Ketua adalah terkait dengan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik), kami juga sedang bekerja keras dengan lintas kementerian, bahwa SPBE ini yang ingin kami sampaikan tidak harus menambah aplikasi, sehingga satu inovasi tidak harus satu aplikasi. Terkait dengan pelayanan eksternal dan pelayanan internal, ini terkait dengan integrasi. Interprobilitas antar sistem di lingkungan pemerintahan, ini terus kami kejar atas arahan Bapak Presiden.

*Urgency*-nya ke depan, ini untuk memudahkan mengakses layanan publik, karena sekarang lebih dari 27.000 aplikasi, sehingga rakyat akan rumit karena harus membuat akun banyak untuk mengakses pelayanan publik.

Yang kedua, untuk menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, dan indeks penegakan hukum.

Inilah transformasi digital, secara *highlight* saja, kami percepat. Pelayanan publik pemanfaatan *digital* berbasis data kependudukan; ada portal pelayanan publik yang ini sedang kita dorong, sehingga setiap kementerian tidak perlu banyak apa namanya banyak akun. Ada banyak aplikasi, tapi kita bisa desak mereka untuk mengintegrasikan sistem layanan dan berbagai akun yang ada di kementerian/lembaga.

*Nah* secara nasional kira-kira seperti ini, *background*-nya salah satunya adalah kependudukan. Karena kalau data kependudukan telah terdigital, telah bisa diakses secara online, maka ini akan banyak menerbitkan berbagai mulai data soal kemiskinan, soal terkait dengan imigrasi, dan seterusnya, dan seterusnya, termasuk hak-hak warga sipil yang lain.

Orkestrasi problem nasional ini diorkestrasi oleh 4 (empat) Menko. Jadi kalau 4 (empat) Menko ini bergerak, ini tercapainya akan cepat, dan kami sangat senang, karena 4 (empat) Menko ini bergerak cepat atas saran Bapak Presiden, sehingga penanganan program nasional secara terpadu melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program lintas sektor ini bisa berjalan.

Bapak/Ibu sekalian,

Berikutnya, terkait dengan penyederhanaan jabatan untuk birokrasi yang lincah.

Kemarin kita agak repot sekali, karena jabatan pelaksana kita begitu banyak, sehingga ini sangat berat untuk bergerak cepat. Maka dari 3.414 klasifikasi, kami telah rombak tinggal menjadi 3 klasifikasi saja. Dan ini berdampak pada kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN.

Begitu juga untuk jabatan fungsional yang ASN hanya bisa pindah dalam satu rumpun. Kalau dulu hanya jadi arsiparis, dia sampai pensiun di arsiparis, sekarang mereka sudah bisa digerakkan sesuai dengan potensi mereka, sehingga ASN bisa pindah lintas rumpun, sehingga birokrasi jauh lebih lincah, dan ini berdampak kepada 2,1 juta ASN.

Berikutnya ASN kalau dulu disibukkan pengisian angka kredit dan pengajuan Dupak (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit), sekarang tidak ada lagi pengisian Dupak yang cenderung administratif, sehingga ASN bisa total mengajar dan capaian organisasinya kami harap ke depan jauh lebih tinggi.

Terkait dengan penyederhanaan regulasi, Pak Ketua, kami juga ingin laporkan. Kami sedang bekerja keras dengan lintas kementerian yang dikoordinir oleh teman-teman di deputi SDMA. Saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang *over regulated*, tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia. Maka nomor pilihan pertama revisi Undang-Undang 5 tentang Regulasi Aparatur Sipil Negara yang sedang diprakarsai oleh teman-teman DPR.

Yang kedua adalah perumusan PP Manajemen Pegawai ASN yang ini akan mencabut seluruhnya dari 307 peraturan. Mencabut sebagian dari 16 peraturan, dan ini prakarsa Kemenpan RB yang sekarang sedang dibahas, termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 299 Kerpres Perpres, dan 1 Kepres.

Bapak/Ibu sekalian,

Yang berikutnya adalah 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang terus menjadi fokus kami, yaitu mall pelayanan publik yang *direct service*; pelayanan langsung, orang yang langsung datang ke mall pelayanan publik.

Yang berikutnya ada *electronic service* yang sekarang sudah dikembangkan yaitu MPP digital. Beberapa daerah telah cukup apa progresif untuk menuju ke tempat ini.

Yang berikutnya adalah *self service*, pelayanan mandiri.

Yang berikutnya adalah *mobile service*, pelayanan langsung, yang keliling ke berbagai tempat.

*Nah* MPP digital ini bapak/ibu sekalian, targetnya Mei. Ini akan jalan untuk di sedikitnya 20 kabupaten/kota dan menuju ke 100 kota. Yang sekarang ini terus dilakukan replikasi dari *eh*, apa dari *smart* kampung yang di Banyuwangi bersama dengan Telkom, Mandiri, LNSW, dan juga PERURI. Di mana MPP digital ini merupakan pelayanan publik berbasis elektronik, pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi, yang fitur-fitur utamanya sekarang Pak Ketua adalah terkait dengan pengajuan permohonan layanan, *tracking* layanan, riwayat layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, dan notifikasi.

*Nah* sekarang ini Pak Ketua, di berbagai daerah sekarang penduduk sedang melakukan *fish recognition*. Sekali saja, sehingga begitu melakukan *fish recognition*, data mereka sudah ada di data digital. Mereka tidak perlu lagi berulang untuk pengisian data, karena data mereka telah direkam.

Sehingga dengan demikian targetnya, kalau sebelumnya masyarakat mengisi data berulang-ulang, targetnya ke depan masyarakat hanya cukup sekali *input* data saja. Karena sudah pakai *fish recognition*, maka data mereka keluar. Sehingga kalau dia datang ke rumah sakit secara bertahap, tidak harus mengisi banyak aplikasi, cukup dengan menggunakan ID yang mereka miliki, data-data itu akan keluar.

Inilah rintisan MPP digital di 21 kabupaten/kota yang kemudian juga ada 100 kota berikutnya yang menjadi rintisan dari mall pelayanan publik yang sekarang sedang dikerjakan bersama-sama.

Integrasi adminduk dengan seluruh pelayanan publik. Ini menjadi pekerjaan kami dengan Kemendagri Pak Ketua dengan anggota dewan yang terhormat, yang dibantu oleh Telkom, LNSM, Mandiri dan juga oleh apa namanya oleh PERURI.

*Nah*, inilah peta sebaran MPP di Indonesia. Ini jumlah MPP berdasarkan tipologinya: ada kabupaten, kepulauan, kota, dan seterusnya, dan seterusnya. *Nah*, ini adalah progres pembentukan MPP kami ingin laporkan, karena MPP ini digital yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat lewat mall pelayanan publik ini. Belum terdapat di 394, tapi secara bertahap sudah terdata 308, dan masih dalam proses 56 kabupaten/kota.

Kami kira ini Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hal-hal pokok dan juga skala-skala, skala prioritas yang sedang kami kerjakan hari-hari ini di Kemenpan-RB.

Selebihnya jika ada pertanyaan, nanti lampiran-lampiran yang akan terus kami sampaikan, termasuk kami sudah membuka layanan telepon, Pak Ketua, karena beberapa kebijakan baru ini rata-rata tidak dipahami dengan baik oleh daerah.

Maka banyak daerah kadang harus konsultasi dan perjalanan dinas ke Jakarta. Supaya tidak menumpuk perjalanan dinas ke Jakarta, maka sudah kami buka ini. Kalau hari Selasa hari SDM Aparatur, kalau hari Kamis pelayanan publik, kemudian Rabu hari Kunwas, Jumat kelembagaan. Sehingga mereka bisa tanya *by phone*.

Begitu juga kami telah berikan jabatan fungsional mereka tanyanya ke siapa untuk instansi pusat. Evaluasi kelas jabatan instansi pusat ke siapa? Semua kami *deploy* untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Begitu juga terkait dengan pengadaan, penanganan dan pengadaan untuk ASN, sehingga dengan demikian *alhamdulillah* kami juga buat cap untuk Sipandai, sehingga mereka secara elektronik bisa dijawab dengan cepat kalau pertanyaan-pertanyaan di sana berulang.

Dari apa yang kami kerjakan ini Pak Ketua, kami bisa mengurangi tamu 93%. Jumlah tamu kementerian berkurang datang ke kantor dan ini jumlahnya cukup signifikan, kalau bisa kita selesaikan secara *daring*, kecuali yang sangat mendesak saja yang datang ke tempat kami. Dan ini kita bisa hemat kurang lebih perjalanan dinas 75 miliar dalam beberapa bulan ini meng apa namanya, dengan daerah tidak lagi datang ke Jakarta.

Dan ternyata jauh lebih efektif, karena datang ke Jakarta, rombongan 15 orang, yang datang kadang cuma 3 orang yang datang. *Nah*, 3 orang itu pun kadang sambil main HP tanya-tanya, tapi dengan ini mereka lebih apa mendapatkan informasi yang cepat.

Kami kira terima kasih.

Selamat pagi,  
*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Walaikumsalam warahmatullah.*

Terima kasih Saudara Menteri PAN-RB.

Bapak/Ibu sekalian,  
Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI,

Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan.

Yang pertama nanti yang terkait dengan soal seputar *channel* DPR, mungkin setelah ini nanti ditindaklanjuti di temuan langsung antara Pak Sekjen dengan Bu Sekjen juga.

Kemudian yang kedua, kami persilakan Bapak/Ibu kalau ada yang mau. Pak Junimart, Syamsul, Pak Gaus, Pak Endro, Pak Cornelis.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Nanti kita bagi aja.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Pak Haruna.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Kita bagi.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Pak Wahyu, Pak Agung, Pak Endro, Pak Rifky, Pak Teddy, Pak Heru. Banyak.

Silakan Pak Junimart.

**F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Terima kasih, Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,

Saudara Menteri dan jajaranya,

Di halaman 10 Pak, 10, tentang hasil pendataan tenaga *non* ASN. Jumlah tenaga *non* ASN 2.360.723, saudara Menteri. *Nah*, kami ingin bertanya apakah dari total tenaga *non* ASN sudah termasuk satpol PP yang lebih kurang 70.137 dan rata-rata mereka yang sudah bekerja di atas 10 tahun, itu yang pertama.

Yang kedua, menyangkut IPDN saudara Menteri. IPDN itu dalam formasi yang harus dipenuhi karena menyangkut juga dari OAP, orang asli Papua, orang asli papua, total yang diajukan itu 1.410 praja untuk tahun 2023 dan dari total ini ya merupakan hasil pembahasan dengan tim Kemenpan-RB, ini sudah pernah dibahas Pak, kita punya suratnya di sini.

*Nah*, ternyata dari pembahasan yang sudah *fix* Kemenpan-RB membuat surat bahwa untuk mengisi CPNS di lingkungan pemerintah dari IPDN diterapkan hanya 534 formasi begitu Saudara Menteri.

*Nah*, kalau 534 formasi ya, menurut kami tidak rasional. Kenapa demikian, seyogyanya selama ini ya untuk 1 kabupaten/kota masing-masing terbagi 2 orang pamong, 2 orang pamong di sana dan provinsi 4 pamong setiap tahunnya, 4 pamong. Kalau hanya diberikan kuota 53 formasi, tentu akan membuat apa namanya, kerja-kerja di daerah itu dari pamong akan pincang

Saudara Menteri dan kalau kota tiap tahun 534 maka dipastikan IPDN akan kosong, IPDN akan kosong.

Kenapa demikian, kuota IPDN itu lebih kurang di atas seribu, 1.100 Pak selama ini dan anggaran sudah kita ketok untuk tahun 2023, Pak Menteri. *Nah*, dibandingkan dengan sekolah-sekolah kedinasan lain, seperti misalnya Kementerian Perhubungan membutuhkan 1.408 kebutuhan, Keuangan 1.100, Hukum dan HAM 525.

Ini tidak perlu Bapak, kenapa IPDN harus diubah dari segi perbandingan biasanya dan itu dari hasil kajian setiap tahun 2 untuk kabupaten/kota, untuk provinsi 4 saudara Menteri, ini kira-kira apa rasionalitas dari Kementerian PAN untuk memberikan kuota yang jauh sekali daripada yang sebelumnya dari 1.410 menjadi 534 formasi ini Pak, apa pertimbangan realisasi rasionalnya?

Saya menyinggung sedikit tentang parlemen. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa parlemen disebutkan 400 formasi saudara Menteri, 400 formasi, 400 formasi dan semua punya unit kerja di sana. Tetapi surat dari Kemenpan mengatakan, mengurangi realisasi rasional 70% ya Pak Dirjen, efisiensi 70%. Kami yang merasakan di DPR ini bagaimana Kesekjenan itu bekerja secara terus menerus dan apabila dilakukan efisiensi 70% maka *nggak* usah menurut kesekjenan, menurut kami membuat kerja-kerja DPR akan terganggu.

Lagipula kenapa harus misalnya ada surat dari Kemenpan ya Kemenpan yang hanya memberikan kewenangan kepada empat instansi atau lembaga yang bisa menerima calon ASN yaitu; yudikatif, Mahkamah Agung, kalau saya *enggak* salah BIN, dosen dan Kejaksaan. Artinya, tolong dari Kemenpan itu melakukan kajian kembali supaya parlemen juga dimasukkan ya dalam salah satu lembaga, jadi 4 + 1 jadi 5.

*Nah*, bagaimana aturan mainnya atau apa yang di perlu di didetailkan, menurut kami dari Sekjen Kemenpan bisa komunikasi, koordinasi dengan Sekjen DPR RI ya. Apalagi DPD itu ya DPD itu tidak sampai 70 Pak, DPD ya kan, tidak sampai 70%, kalau DPR itu udah sampai 70% ke Menteri. Saya kira sementara ini saja, Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Terima kasih, Pak Junimart.

Selanjutnya Pak Syamsurizal.



**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Ketua.

Pak Pimpinan Komisi II serta,  
Menteri PAN-RB serta,  
Seluruh jajaran yang kami hormati dan,  
Anggota yang berbahagia,

Langsung saja kami ingin menyampaikan, mohon dimaklumi, tadi disampaikan jumlah pegawai itu tidak-tidak-tidak mengecil justru membengkakan Pak, Pak Menteri kan ya setelah dilakukan pendataan pegawai *non* ASN.

Termasuk didalamnya sebagaimana yang sudah sering kita bahas adalah pegawai misalnya pegawai honor di KPU, pegawai honor di Bawaslu yang mereka itu adalah menjadi tenaga handalan di di tempat mereka bekerja dan itu yang menjadi jaminan untuk mem-*follow up* pekerjaan tahapan di di KPU, Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu ke depan.

Sementara ancaman dalam PP Nomor 9 Tahun 2012 akan berakhir pada tanggal bulan November tahun 2023 ini waktunya sudah sangat dekat begitu, Pak Menteri. Kita sangat mendukung dengan *statement* Pak Menteri yang sudah diekspos, bahwasanya kita tidak akan PHK massal, dan tidak akan ada pembengkakan anggaran, kita sangat dukung sekali itu dan *enggak* mengurangi pendapatan dari masing-masing mereka yang akan diterima, serta sesuai dengan regulasi yang ada.

Jadi saya ini agak pelik juga memikirkan bagaimana kombinasi dari keempat hal yang memang kita sangat harapkan itu bisa terwujud, tapi dalam waktu yang singkat di tangan kami, apakah itu bisa direalisasikan tanpa ada pengurangan pendapatan mereka, tanpa ada pembengkakan anggaran. Kemudian artinya mereka tidak diberhentikan, kemudian mereka itu tidak berkurang pendapatan atau penerimaan mereka dan tetap kita akan menggunakan regulasi yang ada.

*Nah*, jadi barangkali secara konkritnya ini kira-kira bagaimana rumusnya yang akan kita hadapi. Apakah ini akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau bagaimana? Kalau pun akan dituangkan bagian-bagian itu dalam Rancangan Undang-Undang 2014 apakah perubahan itu akan bisa kita keburu menjelang bulan November tahun 2024 yang sudah menjadi ancaman pegawai honor kita seluruh Indonesia.

Ya kita memang akui ada beberapa keteledoran yang dibuat oleh kepala daerah yang melanggar maksudnya pelarangan pengangkatan justru mereka mengangkat pegawai honor itu, tapi ini sudah nasi jadi bubur, mereka tidak bisa kita apa-apain. Walaupun ada dari mereka yang belum menyampaikan SPTJMNya itu ya kita itulah kondisi kita Indonesia, *nah* itu yang pertama kami ingin tanyakan.

Yang kedua, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Junimart tadi itu tentang pegawai parlemen ini, Pak Menteri. Kalau saya menyoroatnya, ada nanti kepincangan struktur yang ada di dalam struktur kelembagaan di Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Kalau tidak kita siapkan pegawai-pegawai negeri dari mereka dan hanya kita kerjakan tenaga-tenaga honorer saja misalnya, suatu ketika kan mereka akan pensiun. *Nah*, bagaimana cara kita mengisi bagi mereka-mereka yang pensiun dan kekosongan-kekosongan yang terjadi akibat mereka yang pensiun itu ya sangat terganggu, sementara kan DPR RI ini akan kerja terus di satu sisi.

Di sisi lain, kami juga sebagai anggota menjadi terhalang juga, beberapa pelayanan menjadi terhambat. Misalnya pelayanan keuangan atau pelayanan kepegawaian mereka atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kunjungan kita ke suatu tempat ke daerah lain yang lain. Jadi kalau memang mereka tidak profesional bekerja, mungkin karena tidak ada *job* yang tidak memberikan motivasi mereka, ini yang ya yang kita kasihan kan, jadi pegawai-pegawai yang jelas memerlukan motivasi.

Kami berharap hal ini tidak saja dilihat secara-teknisi kepegawaian dengan aturan-aturan yang ada, tentu pertimbangan-pertimbangan politis juga mesti kita lihat juga sisi-sisi itu, khusus untuk pegawai parlemen.

*Nah* saran kami, apakah ini akan kita masukkan di dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 *eh* 2014 itu, nanti kita akan bahas ke depan. Apakah nanti pegawai akan kita bagi pegawai yang dikatakan pegawai legislatif, pegawai eksekutif, pegawai yudikatif, sehingga ada cantolannya untuk pegawai parlemen ini. *Nah*, itu kemungkinan salah satu solusinya.

Kita sudah bahas juga dengan tim ahli DPR, ada kemungkinan untuk memasukkan salah satu pasal di dalam Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 2000, 2000, 2014 itu mungkin kita dalam salah satu pasal yang seperti itu bunyinya. Jadi ada cantolan untuk pegawai parlemen, *enggak* bisa kita membiarkan mereka kosong dan tidak berkarir dan tidak punya harapan untuk berkarir ke depan dalam, dari sisi-sisi kepegawaian, walaupun tadi konsep ini barangkali yang Bapak, Pak Menteri *expose* ini mengatakan bagus artinya kita berdiri tegak dari kinerja bukan pegawai tumpukan kertas kita setuju itu, tapi itu nanti akan kita buat secara berangsur untuk pegawai parlemen yang ada di di DPR RI itu.

Kemudian yang ketiga barangkali terakhir karena ada rekan-rekan banyak bertanya, ketika kita berbincang dengan para gubernur-gubernur pemekaran di Papua. Jadi Papua, Provinsi Papua mekar jadi tambah 3 provinsi, Papua Barat *eh* Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Papua Barat mekar kan jadi Papua. Jadi ada 6 Papua di sana, ada 6 provinsi Papua dan yang dihadapi ketika itu dan mereka mengadukan kita adalah persoalan ASN yang ada di sana Pak Menteri, ASN yang ada di masing-masing Papua itu.

Pertama, mereka yang selama ini dulu di Provinsi Papua induk itu tidak serta-merta mau pindah ke provinsi pemekaran barunya itu, karena keluarga-keluarga mereka toh tinggal di Papua induk, di Papua. Ya mungkin ada konsultasi dengan keluarganya dipindahkan ke Papua Pegunungan. *Nah*, ini yang jadi keberatan mereka atau dipindahkan ke Merauke atau dipindahkan ke Provinsi Papua Selatan atau dipindahkan ke Provinsi Papua Tengah, jadi ada problem.

Jadi kemarin itu gubernur tidak bertengkar, cuma masing-masing mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena di satu sisi mereka tidak mau pindah, di sisi lain juga ini masih kekurangan, yang ini berlebihan. *Nah*, itu dia, orang asli Papua itu tidak ada niat untuk jadi ASN, jadi tidak-tidak itu jadi pemilihan jadi apa itu ASN *enggak* berminat dia.

Jadi ini juga problem juga barangkali perlu kita berikan perhatian khusus untuk ASN yang ada di sana, karena sudah ada punya 6 provinsi. Jadi saya kira itu tidak sedikit, hampir sebesar Sumatera juga ya prov, Sumatera ada 8-9 provinsi, mereka sudah 6 dan tahun ini akan ada 7 provinsi, Provinsi Papua Utara yang kita akan segera selesaikan juga naskah akademisnya. Jadi barangkali itu Pak Menteri, tiga hal saja yang di Papua.

Kemudian pegawai negeri di ASN di Sekretaris Jenderal DPR RI itu kira-kira rumusan terhadap pegawai-pegawai yang akan berhenti bagaimana agar mereka terhindar dari pemberhentian massal, pendapatan mereka tidak berkurang, kemudian pembengkakan anggaran tidak akan terjadi mudah-mudahan, dan kita tetap berpedomani terhadap regulasi yang ada. Formatnya bagaimana Pak Menteri? Saya kira demikian itu saja yang kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Terima kasih, Pak Syamsurizal.

Pak Gaus.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,  
Bapak Menteri Menpan-RB, Pak Azwar Anas beserta,  
Seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini,  
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Menyimak dan mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri dan membaca berita tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Menpan-RB ke berbagai mass media dan itu adalah berdasarkan permintaan daripada Bapak Presiden tentang kebijakan *non-ASN*.

Saya meresponi apa yang Bapak ungkapkan itu, di mana kebijakan itu adalah tidak akan mem-PHK para *non ASN*, di mana PP yang mengatur tentang itu bahwa tanggal 28 November sudah tidak ada lagi namanya *non-ASN* itu.

PP ini tentunya membuat galau para *non ASN*, tapi dengan berita-berita yang Bapak ungkapkan, saya menggarisbawahi terhadap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden tentu para *non-ASN* merasa gembira karena diperlakukan diperlakukan sesuai dengan harapan dan keinginan, tetapi saya melihat bumi jelas *grand design* daripada solusi terhadap mereka mereka itu.

Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49 2018 ini kan menjadi simalakama bagi pemerintah pusat, di mana pada Pasal 96 dinyatakan bahwa, PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan ASN *eh* di luar *non-ASN* dan PPPK, artinya dilarang mengangkat para *non-ASN*.

Di satu sisi Bapak di PP ini juga mengatakan bahwa, yang 2018 ke bawah itu dinyatakan bahwa pegawai *non-ASN* masih dapat bekerja sampai dengan 2023. Artinya adalah *non-ASN* yang diangkat sebelum tahun 2018. Logika berpikirnya adalah Pasal 96 itu menyatakan, "di atas 2018 tidak ada satupun institusi ataupun pejabat untuk melakukan pengangkatan *non-ASN*" dan kita selalu berbicara tentang hal ini. Berapa sebetulnya jumlah *non-ASN* itu?

Validitasnya sampai detik ini saya katakan juga belum pas walaupun Bapak mengatakan dalam buku kerja Bapak ini mengatakan 2,3 juta lebih. Ini bisa saya konfirmasi kepada Bapak ketika Bapak menyampaikan kepada kami ada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada seluruh institusi, baik pemerintah pusat atau pun daerah, ada yang tidak menjawab. Saya kesal ketika itu, masa kementerian/lembaga apalagi pemerintah daerah masih ada kata Bapak, maaf saya ingat betul itu. Mau dibawa ke mana pemerintahan kita? Masa Menpan-RB yang ditugaskan oleh Presiden menangani persoalan-persoalan tentang Aparatur Sipil Negara dan struktur pemerintahan masih saja ada pihak pemerintah pusat, satu. Saya ingat betul, saya tidak salah barangkali, boleh dikoreksi kalau salah, itu pernyataan Bapak ketika itu, termasuk juga kepala-kepala daerah.

Berkaitan dengan Bapak baru saja masuk sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden sebagai Menpan-RB Bapak keluarkan surat edaran.

Saya juga menyampaikan ketika hasil reses dan juga ada konferensi yang dilaksanakan di MPR ini saya juga adalah sebagai narasumber. Mereka itu mengeluh dan menyampaikan kepada MPR ketika itu, satu di daerah dapil

saya ketika itu di Pariaman dan Kabupaten Solok sikap daripada pemerintah juga sebetulnya maksud Bapak Menteri ini sangat luar biasa, untuk menampung semua data-data itu jangan ada yang tinggal, sehingga Bapak akan membuat *grand design* mau dikemanakan para *non-ASN* ini.

Kalau *non-ASN* ini berbagai macam juga *level*-nya, Pak. Yang saya ungkapkan ketika itu adalah di mana BKD tidak meresponi malah Kepala Dinas Pendidikan Pak, itu di kota Padang Pariaman. Datang para guru kepada saya dia mengatakan, data kami tidak bisa dimasukkan menjadi bahagian dari surat edaran. Saya ingat betul ketika itu standarisasi untuk direkrut minimal umur 56 tahun kalau saya tidak salah, kedua masa kerjanya lebih dari 1 tahun, surat edarannya, Bu kalau saya tidak salah itu bunyinya.

Yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah masih banyak Bapak Menteri kepala-kepala daerah karena apakah kepentingan politik dan lain sebagainya, kalau di Kabupaten Solok saya katakan, orang yang sudah berstatus K2 tidak masuk dalam *update* data itu. Dia menyampaikan ketika itu di sini Pak dan ini adalah pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan, silakan lihat di YouTube nanti.

*Nah* yang ingin saya sampaikan adalah *non-ASN* ini ketika kami bicarakan Pak selalu saja naik nilainya Pak, 500 ribu, 900 ribu, 1,2, 1,6, sekarang 2,3 dan 2,3 juta ini pun, saya rasa masih banyak masyarakat-masyarakat yang *non-ASN* itu berharap dia adalah bagian daripada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada pemerintah.

Oleh karena itu, tentu yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sikap pemerintah terutama Bapak Menteri Azwar Anas yang mengomandoi tentang persoalan-persoalan tentang *non-ASN* ini terhadap mereka-mereka yang "*dizholimi*" itu, karena ada BKD *enggak* mau, *enggak* usah, dan sebagainya banyak alasan Pak, itu salah satu contoh. Dan banyak lagi seperti yang disampaikan banyak juga yang datang ke sini tentang Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.

Apa upaya yang ingin Bapak lakukan sehingga *update* data itu betul-betul *valid* sehingga Bapak dan pemerintah pusat jelas sikapnya bagaimana terhadap persoalan-persoalan itu.

Oleh karena itu, kemudian yang kedua adalah bentuk daripada solusi ini bagaimana Pak ini yang ditunggu-tunggu. Yang jelas dikatakan bahwa 28 November tidak ada yang di PHK, syukur *alhamdulillah*, ini kebijakan yang sangat luar biasa dan ini adalah yang ditunggu-tunggu.

Kalaulah memang ini tidak akan dilakukan PHK dan lain sebagainya kalimat-kalimat yang tidak akan merugikan para *non-ASN* supaya jelas pula masa depan mereka-mereka itu dengan berbagai macam ragam bentuk daripada *non-ASN* itu, kira-kira solusi yang akan diberikan dan akan dicarikan solusi oleh pemerintah bersama DPR itu usulan dari Bapak itu kira-kira seperti apa. Ini *zoom* Pak, ini didengar oleh semua, ditunggu-tunggu, Pak.

Kalau Bapak ke sini, para *non*-ASN itu nonton dari Aceh sampai Papua, Pak karena menyangkut harkat martabat kehidupan mereka masa depan. Tolong juga kebijakan yang transparan, jangan ini hanya angin surga karena kita akan menghadapi pemilu, jangan begini Pak. Kami profesional dalam hal ini walaupun kami ini adalah politisi. Harus jelas mau dibawa kemana para *non*-ASN sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah. Apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Syamsurizal tadi, anggarannya yang tidak membengkak, kemudian kesejahteraannya tidak diturunkan, di satu sisi pemasukan kita bagaimana, ini kan sesuatu yang dilematis. Nah ini yang perlu saya minta penjelasan dari Pak Menteri.

Kemudian saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Junimart. Saya ketika itu merasa sudah ada *win-win solution* tentang DPR, tentang Kesekretariatan. Saya barangkali sudah tiga setengah tahun dan maaf Pak tidak sebetulnya saya tidak mau bicara tentang hal ini.

Saya bilang sama Pimpinan tadi, tapi lewat lobi-lobi agaknya apa yang disampaikan oleh DPR belum mendapatkan respon yang positif. Saya perlu juga memberikan gambaran, jangan disamakan DPR ini, lembaga ini dengan kementerian dan lembaga Bapak, Ibu, Pak Menteri.

Saya tiga periode di DPRD provinsi Pak, Pak Menteri pernah jadi Bupati. Bahwa seorang Sekjen, seorang Sekretaris DPR itu berbeda layanannya dibandingkan dengan kementerian dan lembaga, Pak. Bosnya Sekjen ini bukan hanya Pimpinan DPR, bosnya DPR, pegawai Sekjen ini seluruh Anggota DPR Pak.

Saya tidak harus melalui Ketua untuk berurusan yang berkaitan tentang kepentingan pribadi saya dan kawan-kawan Pak, karena apa? Karena struktur kami di Anggota Dewan namanya bukan kepala. Kalau kepala adalah bersifat horizontal dan sifatnya adalah komando dan patuh dan taat apa yang dikatakan oleh kepala. Sedangkan ketua adalah fasilitator Pak.

Mengeluh para Sekretariat itu Pak, Sekretaris DPR, termasuk Sekretaris beliau Sekjen kita ini, Pak. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah pola perilaku manajemen di pemerintahan ini, harusnya tentu harus kita bedakan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Memang jumlahnya 575, tetapi ragam kepala dari 575 ini kalau *enggak* piawai Sekjen ini barangkali sudah *stroke* beliau ini.

Saya kasihan melihat selalu, saya selalu kasihan lihat beliau ini Pak tidak pernah duduk, ini karena perintah Ketua tadi. *Enggak* berani juga beliau duduk di sini Pak, tapi karena ingin bagaimana komunikasi kita harmonis apa yang disampaikan dan lain sebagainya, itu salah satu bentuk.

Yang kedua, ada kebijakan dari Menpan-RB yang dikatakan tadi oleh Pak Junimart, ada empat lembaga Kejaksaan, Mahkamah Agung, BIN, dosen. Tentu kami berharap juga kepada, berharap saya ini Pak kepada Menpan-RB,

kenapa tidak juga diberlakukan hal yang sama terhadap yang menjadi rintihan dari Pak Sekjen kita ini.

Oleh karena itu, saya meminta kepada Pak Sekjen, eh Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri ATR BPN *eh* Menpan-RB ya agar bisa merevisi Pak surat yang Bapak keluarkan Nomor 521 MSN, MSN.0100/2003 untuk membuka ruang sebagaimana yang saya katakan tadi, Pak.

Mudah-mudahan ini jangan menjadi, kalau saya ilustrasikan panjang Pak, kerja-kerja daripada Sekretariat ini *enggak* sama dengan di instansi lain, bisa kerjanya itu sampai pagi Pak. Dan itu pernah saya alami Pak sampai subuh, lanjut lagi rapatnya Pak jam 10, setelah baru ketok palunya jam 4, jam 5 lanjut kita *briefing* dan itu tidak hanya kami kami Anggota-Anggota Panja, Anggota Pansus, tetapi pasti didampingi oleh Sekretariat.

*Nah*, ini lah dedikasi yang dipersembahkan oleh Sekretariat kami. Tentu baru pertama kali saya ngomong Pak, maaf saya sebetulnya *enggak* berkehendak tapi karena perintah Pak Junimart. *Nah*, itu yang disampaikan tadi betul Pak, malu saya bicara ini sebetulnya lewat lobi antara Pak Junimart, Pak Doli dan Pimpinan yang lain dengan Pak Menteri menurut hemat saya ini sudah selesai. Ini masalah rumah tangga kita cukup dibicarakan secara personal, tetapi karena ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Sekjen DPR RI, saya terpaksa juga untuk mengungkapkan ini. Karena ini adalah juga merupakan aspirasi dari Anggota DPR RI bukan Komisi II saja ini Pak, karena di sini corongnya adalah untuk bisa bicara dengan Pak Menpan-RB yang adalah Komisi II kami ini adalah Pak Menteri.

Pak Menteri, saya bicara nanti beliau *enggak* dengar. Saya omong beliau omong begitu nanti *enggak* tahu. Saya ingin sampaikan adalah ini adalah aspirasi kawan-kawan anggota Komisi dari I sampai dengan XI dan juga alat kelengkapan dewan lainnya, jadi jangan bapak lihat ini adalah aspirasi Komisi II. Barangkali demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Walaikumsalam warahmatullah.*

Terima kasih, Pak Guspari Gaus.

Pak Endro.

**F-PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pak Menteri PAN-RB beserta jajarannya,

Pertama, saya mengapresiasi paparan dari Pak Menteri kaitannya mulai dari pendataan maupun apa namanya *grand design* yang ada. Ada beberapa hal yang mungkin saya dari perspektif yang berbeda.

Yang pertama kaitannya dengan apa, Surat Edaran Menteri yang kaitannya penghapusan *non-ASN* November 2023. Saya minta itu tegas aja di sini diputuskan dicabut saja begitu, karena ini berdampak luas dan membingungkan.

*Nah*, ini kan, ini kan apa mulai dari apa ya. Yang paling ini kan kontradiksi dengan paparan Pak Menteri yang apa isu lainnya, penerapan reformasi birokrasi tematik menerjemahkan arahan Presiden. Ada tiga yang satu, kemiskinan. Indeks reformasi birokrasi. Yang ketiga adalah mengurangi dampak resiko kepada masyarakat. Yang saya, yang poin paling penting adalah terkait dengan masalah kemiskinan.

Di sini kan Presiden Jokowi sedang giat-giatnya menanggulangi kemiskinan, di mana ada yang namanya para pendamping PKA, SDM-nya cukup banyak di kabupaten, Pak Menteri pernah jadi Bupati pasti paham, ini mau diapakan? Padahal ini tugas mulia yang harus diselesaikan.

Belum lagi yang lain-lainnya termasuk kalau kita turun ke daerah. Banyak guru-guru yang apa namanya, juga masih honorer juga banyak dibanding yang-yang PNS maupun yang apa PPPK. *Nah* ini, di sini dari paparan yang ada belum secara tegas, malah dikatakan perlu kesepakatan. Kesepakatan kami adalah untuk mencabut surat ini dulu, supaya tidak menjadi apa menjadi gundah gulana, itu yang pertama.

Yang kedua, kita bicara masalah kekinian. Ini dari paparan Pak Menteri ini memang luar biasa. Ini pendekatan *grand design* maupun pendekatannya teknokratik. Ini sebenarnya paparan seperti ini Pak Menteri lebih cocok jadi Menko, supaya bisa menerobos kementerian yang lain, tidak Menpan-RB tidak apa berdiri sendiri. Maksudnya apa, tidak pada level kementerian saja, sampai saya pikir reformasi birokrasi sampai daerah. Betul ada MVP sudah, digitalisasi oke, satu hal yang lupa adalah manusianya, reformasi mental manusianya ini.

Contoh, contoh yang paling sederhana saja. Kaitannya masalah data kemiskinan. Orang miskin harus melapor bahwa saya miskin, orang meninggal harus lapor saya sudah meninggal, ini kan carut marutnya birokrasi di mana birokrasi yang belum-belum hadir untuk menyongsong yang ada. Sistem sudah terbangun, tapi manusianya belum. Bagaimana gerakan-gerakan budaya kesadaran untuk melaporkan hal-hal yang ada supaya masuk ke dalam sistem. Sistem gampang dibuat, tapi orang itu sulit dibangun ke sana.



Yang berikutnya kaitanya kekinian juga, lebih dari separuh provinsi maupun kabupaten itu dijabat oleh pejabat, bupati maupun gubernur. Ini semuanya ASN. Saya menagih-menagih tata kelola pemerintahan yang baik, di mana asas-asas umum yang baik itu harus dijaga karena ini *level*-nya ASN.

Maksudnya, kita lihat Menpan-RB harus berkomunikasi mutlak, kalau tadi bicara masalah apa namanya, kolaboratif harus Menpan-RB harus kolaboratif dengan Kementerian lain. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri dalam artian pengangkatan PJ. Ribut di samping kita Provinsi Banten.

Pengangkatan PJ Sekda oleh PJ Gubernur ini dipedumkan, belum di musyawarah. Karena apa? Dia diangkat jadi PJ Bupati waktu itu posisinya sebagai Sekda. Begitu dia merangkap Sekda, dia melepaskan diri jadi Sekda mengangkat PJ Sekda, ini kan *nggak* boleh, *legal standing* seperti apa?

Saya juga minta juga dikaji juga di Menpan-RB di BKN ada ini seperti apa? Ini kan *enggak* boleh begitu digugurkan sebagai Sekda-nya habis dia sebagai *legal standing* dia sebagai PJ kepala daerah. Ingat ini bukan pemilihan, ini apa pejabat ya yang ASN.

Di daerah lain, di daerah saya ada, di kabupaten dapil saya di Lampung itu sama. *Nah*, ini keterusan keterlanjuran kesalahan yang tidak pernah dikoreksi oleh Menpan-RB ini menjadi kebiasaan yang buruk, tata kelola yang jelek.

Yang berikutnya, model ini kan tahun politik di mana begitu rebutan PJ pasti ada masalah, ada apa-apanya, apa adanya, bukan apa adanya, ada apanya, mereka berlomba-lomba bagaimana melakukan *rolling*.

*Nah*, ini saya yang model begini saya mengapresiasi dari Menpan-RB di mana ada beberapa keputusan konsultasi dengan BKN Menpan-RB itu di-stop, di-stop karena belum 2 tahun menduduki posisi terakhir sudah dirolling, baru setahun PJ-nya ada *rolling*.

*Nah*, ini hal-hal inilah yang harus perlu diperkuat kerjasama kolaboratif. Penegakan aturan ada PP berapa itu PP 116 kalau salah 116 *eh* Perpres 116, 2022. Dia itu kalau *me-rolling* harus meminta persetujuan BKN. Di daerah saya banyak tuh *rolling-rolling* saja. Kebiasaan yang lama itu hanya dengan Mendagri selesai. *Nah*, ini kan ada Perpres. Saya *enggak* tahu nih Perpres ini apa bunyi-bunyian atau apa namanya ditaati. Bagaimana mereka yang melanggar Perpres yang ada? *Enggak* diapa-apakan tuh. Jadi kalau kalau memang *enggak* ditegakkan Perpres ini dicabut saja, diusulkan dibuang saja. Ini carut marut di daerah begitu, begitu ada PJ, *rolling* besar-besar begini-begini, ini Republik PJ bahaya.

Ini Menpan-RB harus di depan untuk mengendalikan birokrasi yang ada, supaya pada tupoksinya BKN itu luar biasa ada LAN juga di situ. Ini saya tuntut Menpan-RB harus kolaboratif dengan kementerian yang lain.

Berikutnya kita bicara kaitannya CPNS PPPK. Banyak masalah yang kemarin mafia CPNS tidak diselesaikan. Aktor intelektualnya mana? Kami tidak mendapatkan data yang ada. Ini kalau tidak diselesaikan dari akarnya akan terus berulang.

Saya temukan di daerah yang menjadi salah satu pemain mafia CPNS juga didiamkan, kebanyakan BKD. Ada yang didiamkan dalam posisi yang biasa tetep jabatannya. Ada yang memang di apa namanya kena sanksi, anehnya dia menjalani hukuman tapi tidak ada keputusan dia dihukum balik lagi dia.

Saya *enggak* tahu ini apa namanya, kita bicara aksi ke depan rekrutmen dan sebagainya. Akar masalahnya dari tahun ke tahun begitu ada seleksi, ada mafia, dan sebagainya tidak pernah selesai. Kasihan masyarakat yang *enggak* punya duit. Prestasi, pintar, jadi PNS kena mafia. Saya minta ini apa namanya tanggung jawab yang ada ini diselesaikan.

Terus yang berikutnya kaitannya peningkatan investasi di sini. Saya bicara masalah langsung menterjemahkan apa yang dikatakan oleh apa paparan ini. Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi.

Ini kan saya orang daerah, jadi begitu aturannya saling bertindihan tidak jalan. Daerah banyak kerusakan lingkungan ternyata izinnya itu di provinsi atau sekarang tarik pusat. Daerah teriak *enggak* bisa apa-apa.

Saya dekati supaya bicara masalah kerusakan lingkungan bicara masalah apa namanya penegakan hukum lingkungan. Dia izinnya di pusat *enggak* bisa, pusat *enggak* bisa kontrol karena itu lalu di daerah.

*Nah* itu mungkin apa namanya Pimpinan, jadi apa Pak Menpan-RB saya minta ini sudah saatnya Menpan-RB tampil ke depan, di mana birokrasi menjadi andalan, di mana apalagi sekarang itu mendekati tahun politik penjabat-pejabat kepala daerah banyak sekali, yang tadinya Sekda menjadi pejabat kepala daerah, dia itu mem-PJ-kan orang lain, hilang posisinya dia, masih bercokol juga.

Saya minta Pak Menteri bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena apa, ini pintu masuknya Kementerian Dalam Negeri. Biasa lupa kalau ada Perpres apakah tidak disosialisasi. Sanksi yang tegas juga harus diberlakukan.

Yang terakhir, ini kaitan ada PPL, apa namanya PLH, PLB, PJS dan sebagainya, ini ada kan batas waktunya. Ini PJ kepala daerah nantinya sampai terpilih kembali itu ada yang melebihi 2 tahun, padahal aturan yang mengatakan satu pejabat kepala daerah bisa 1 tahun kalikan 2, pejabat loh sama pejabat. Kalau setelah dua ini dia mau sebagai apa, *nggak* ada perangkat hukumnya, dia mau memerintah jadi apa, tahun bulan ke ke-25 dia illegal,

*enggak* ada. *Nah*, ini situasi demikianlah yang harus disiasati ke depan seperti apa.

Dua yang kritis yang tadi saya katakan, tahun ke-25 dia tidak dilengkapi dengan regulasi yang ada. Yang kedua, Sekda menjabat PJ kepala daerah, dia mem-PJ-kan Sekdanya itu juga kajiannya seperti apa? Itu *enggak* bisa posisinya dia. Dia jadi PJ kepala daerah karena Sekda, begitu Sekda dicopot hilang, ini masih jalan banyak sekali ini harus ditertibkan.

Yang ini terakhir ya berkaitannya dengan internal juga BKN, Pak. BKN kan sampai sekarang PLT ya PLT ya, itu berapa tahun? 2 tahun lebih itu masa *enggak* ada orang lain sih. Kerangka regulasinya apa PLT terus. Bagaimana bisa jalan seperti ini dengan situasi masalah-masalah birokrasi semacam ini dengan harusnya dengan *full power* dengan posisi-posisi yang kuat. Mungkin itu, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Terima kasih, Pak Endro.

Saya minta persetujuan untuk kita perpanjang paling lama Pukul 13.00.

**(RAPAT : SETUJU)**

Tolong Bapak/Ibu perhatikan waktunya ya.

Silakan Pak Cornelis.

**F-PDI PERJUANGAN (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Baik, terima kasih pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan,  
Kelengkapan Anggota Dewan,  
Yang terhormat Saudara Menteri PAN-RB dan seluruh jajaran,

Terima kasih atas kesempatan yang baik ini.

Saya hanya ingin mempertanyakan dua hal. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junimart selaku wakil ketua mengenai komposisi jatah untuk formasi IPDN. Kalimantan Barat itu hanya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6 aja. Kabupaten lain tidak dapat, yang dapat Kapuas Hulu, Mempawah, Sanggal, Nandak, Kabupaten Kubu Raya dan Singkawang, provinsi aja *enggak* dapat. Sedangkan menurut beliau tadi itu sudah disepakati karena formasinya tidak ada. *Nah*, ini kami mohon penjelasan, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junimart.

Yang kedua, kepastian tentang tenaga honor ini. Mau diberhentikan atau tidak sebagaimana tadi sudah dipaparkan. Ya kita memang harus memberikan penegasan supaya masyarakat tidak ragu-ragu. Kalau memang mau diberhentikan ya diberhentikan, kalau memang mau bertahan ya bertahan. Ya tapi saya mengharap pada pemerintah untuk dicarikan jalan yang terbaik, agar tidak menambah angka kemiskinan.

Saya rasa cukup karena jatahnya hanya 5 menit, mau disampaikan sebenarnya banyak tapi bagi-bagi dengan teman-teman.

Terima kasih.

Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Terima kasih, Pak Cornelis.

Ini Pak Haruna kemana?

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Lewat, lewat, lewat.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Sholat? Saya juga mau sholat Pak.

Pak Wahyu.

**F-P.DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Ketua.

Saudara Menpan-RB,

Dengan saya, saya coba singkat-singkat aja Pak. Semenjak pertama kali menjabat saya lihat mohon maaf Pak Menpan-RB ini lebih banyak pencitraannya Pak daripada yang dikerjakan, saya agak merinding melihat *statement-statement* Bapak itu.

Kembali ke pertanyaan Pak, tadi halaman 2 sampai dengan halaman 12. Jadi penjelasan ini kita sama-sama paham yang penting itu halaman 13 Pak. Pertanyaannya, kapan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Undang-Undang ASN? Jadi semua dari yang halaman 1 sampai halaman 12 kita rangkum saja di pertanyaannya jadi satu pertanyaan.

Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, Bapak mengatakan tadi ini juga terkait *statement-statement* yang dikeluarkan oleh Menpan-RB. Tata kelola birokrasi penerapan reformasi birokrasi tematis. Tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal. Saya *ndak* tahu Pak apa hubungannya reformasi birokrasi dengan anggaran kemiskinan, termasuk juga penghematan 500 triliun yang Bapak sampaikan di media sosial.

Coba Bapak jelaskan dengan saya, apa benda-benda, apa yang berdampak terhadap penerapan reformasi birokrasi tematis ini lebih penting daripada melakukan revisi Undang-Undang.

Karena semua yang Bapak ceritakan ini Pak hampir mustahil dilakukan. Coba saya contohkan lagi Pak ya. Penguatan tata kelola birokrasi merespon mengawasi hal-hal yang mendesak sesuai arahan Presiden berdampak serius terhadap masyarakat. Bagaimana caranya Pak?

ASN ini Pak, dari Sabang sampai Merauke itu yang Bapak jelaskan tadi koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mereka lebih dengar dengan Menteri Keuangan daripada Menteri Dalam Negeri, *enggak* ada yang *enggak* takut Pak dengan Menteri Keuangan.

Peningkatan investasi reformasi birokrasi merupakan penerapan omnibus law meningkatkan kompetitif indeks untuk melipatgandakan prestasi. Balik lagi Pak, kalau undang-undangnya tidak diperbaiki bagaimana caranya, Pak? Ini kan kita membuat semacam narasi yang *enggak* mungkin kita lakukan.

Lagi Pak, transformasi *digital*. Apa yang dilakukan diidekan ini Pak transformasi digital. Memang *platform digital* kita ini banyak sekali, banyak sekali, tapi untuk mengintegrasikannya saya rasa butuh 25 tahun, Pak. Kalau Bapak ingin melihat bagaimana tingkat kesulitan kita, coba sinkronisasi dulu sistem aplikasi pengusulan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu ada banyak sekali itu, ada 3, simpulkan jadi satu dan tiga-tiganya ada di Kementerian Keuangan. *Enggak* mungkin *enggak* ada yang *enggak* tahu di sini. Saya rasa Bapak-Bapak yang bekas bupati dan walikota dan gubernur di sini tahu semua kan. Sudah itu.

*Nah* saya rasa itu saja dulu Ketua, semoga tadi bisa dijawab dengan baik dan benar oleh saudara Menteri.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Terima kasih, Pak Wahyu.

Pak Agung.

**F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran beserta, Pimpinan dan Anggota yang kami banggakan,

Kanan Pak, santai aja Pak jangan terlalu tegang.

Kita pernah punya Menpan sejak periode saya pertama, ada Pak Yudi, ada almarhum Pak Tjahjo dengan sekarang Bapak di sini. Semuanya baik Pak, bahkan yang disampaikan paparan di setiap pembahasan di Komisi II pun juga rasa-rasanya lega.

Tetapi entah kenapa setiap kali ada undangan RDP dengan Kemenpan. Satu, Bapak, teman-teman honorer apa pun sebutan pegawai pemerintah yang ada ini langsung membanjiri HP kita masing-masing, sehingga mau tidak mau bikin telapak tangan dan kaki kita dingin Pak, sementara kepala dan hati panas. Betapa pun ini persoalan yang belum pernah terurai dan belum pernah terpecahkan.

Saya ingin melakukan pendekatan regulasi, mau menggunakan Undang-Undang Kepegawaian atau Undang-Undang yang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau tentang rencana tindak lanjut RUU perubahan ASN.

Saya mencoba untuk melakukan telaah dari sana secara dangkal dalam pemahaman saya belum ketemu. Bagaimana mungkin kita membahas RUU perubahan ASN yang sampai sekarang belum tuntas kemudian kita melakukan langkah kebijakan? Kecuali memang kita mau bareng-bareng bunuh diri mengambil kebijakan yang tidak ada regulasinya.

Contoh, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terutama di PP 49 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah di Pasal 99 di sana ditulis, "pegawai *non*-PNS dan PPK, PPPK masih dapat bekerja sampai dengan November 2023."

Ini kalimatnya manis sekali Pak, masih dapat bekerja 2023. Tapi teman-teman kami di bawah membacanya setelah 2000, November 2023 mereka sudah tidak ada harapan lagi bekerja, mereka sudah tidak mungkin lagi mendapatkan penghasilan sementara mereka menghidupi keluarga banyak sekali.

*Nah* kami mohon, di sana kan Bapak sebutkan perlu ada kesepakatan. Kalau mau menempuh kebijakan itu ya konsep kesepakatannya, kami mohon jangan di tahun politik Pak, itu bunuh diri bareng-bareng Pak dan juga me-membuat kami ada di sudut *ring* yang seolah-olah tidak bisa bekerja begitu. Kecuali Bapak bisa memastikan bahwa pemilu akan ditunda silakan kita bahas sampai dengan tuntas, tetapi kita sudah *commitment on the track* 2024.

Kalau 2023 bulan November kemudian mereka berhenti semua, ini percuma kawan-kawan dulu yang pernah datang di balkon itu kemudian datang kesini mendapat harapan-harapan palsu begitu.

Kemudian mengenai teman-teman di Kesekjenan. Saya bingung kalau dalam desain besar penataan kepegawaian pemerintah ini sebetulnya seperti apa konsepnya? Kemarin saya bicara di media baik di televisi maupun radio, menyoroti tanggapan terhadap rendahnya tukin di Kementerian Keuangan. Di sana tertulis paling rendah 5,3 paling tinggi 117 dari 44.602 PNS. Sementara di DPR paling rendah 1,56 paling tinggi 11 Juta dari 3 ribu PNS yang ada, belum lagi Kemendag dan kementerian/lembaga yang lain.

Kita sedang membahas bagaimana ada kesetaraan, keadilan tentang tukin tiba-tiba dari lembaga internal kami, kita tidak bisa menuntut lebih atau berharap lebih kepada kawan-kawan yang mereka sudah menjalankan fungsinya.

Berdasarkan fungsi yang ada mereka adalah *supporting* unit yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Kalau tidak ada penyedia tata naskah, kalau tidak ada legal drafter, kalau tidak ada kemudian kelompok jabatan staf ahli dan sebagainya, bagaimana mungkin proses berjalannya lembaga legislasi yang ada di DPR ini berjalan dengan baik.

Jadi tolong kalau perlu Pak segera rapat kerja dan terbitkan surat *lex specialis derogat lex generalis*, setidaknya ada aturan khusus di samping aturan yang lain. Toh masih banyak juga apa tuh jabatan-jabatan struktural di lembaga-lembaga lain mereka tukinnya juga masih tinggi. *No tukin no tuis*, tidak ada tunjangan kinerja kalau tidak ada tugas fungsi, saya terima itu. Tetapi kalau sudah tugas fungsi sudah dijalankan dengan baik, harusnya mereka berhak menanyakan *dong* mana tukin-nya begitu, karena tukin salah satu prasyaratnya penyelesaian tugas-tugas dengan baik begitu.

Selanjutnya Pak, kami juga ingin menanyakan di sana ada disebutkan November 2023 mereka kemudian tidak bekerja lagi, masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Artinya November 2023 mereka sudah tidak bekerja lagi. Lah apa akibatnya Pak, kalau sekarang ini kan sudah berjalan mereka masih berjalan mengabdikan pada pemerintah dengan apa pun sebutannya, berapa pun tunjangannya.

Kalau sekiranya ini mengganggu postur APBN, Bapak sampaikan dengan angka-angka, kira-kira beban APBN itu untuk penanganan kepegawaian, pegawai pemerintah dengan apa pun sebutannya itu berapa? Supaya kita juga nanti kita nagih sama Ibu Menteri Keuangan jelas begitu, Pak. Jangan Bapak mengambil kebijakan kemudian ternyata dari kementerian lain, tidak memberikan respon dukungan dari sisi APBN.

Selanjutnya Pak masalah tentang mall pelayanan publik. Ini bagus sekali, rasa-rasanya kalau ini bisa berjalan dengan baik berapa pun pegawainya kalau Bapak mau terapkan struktur yang ideal saya rasa bisa.

Tetapi kalau mall pelayanan publik dan juga apa kebijakan-kebijakan teknologi informatika itu pendekatannya masih pendekatan *project*, pengadaan sistem elektronik, sistem pemerintahan berbasis elektronik apa pun sebutannya di sana, saya yakin tidak akan pernah selesai.

Tadi Bapak menyebutkan salah satu contohnya, salah satu contoh dari sistem ini nanti memperkecil pejabat-pejabat daerah datang ke Jakarta, dengan demikian ada penghematan. *Nah* kami minta catatan berapa penghematan sesungguhnya, berapa harga sistem teknologi informatika ini dan teknologi informatika ini kita beli untuk durasi berapa waktu lamanya? Karena 2024 kita mau pindah ke pusat Pak begitu loh, jangan sampai nanti belanja lagi sistem teknologinya.

Untuk mall pelayanan publik kami mengapresiasi target-target itu, tetapi tolong Pak koreksi, karena apa. Masih aja masih ada warga masyarakat datang ke MPP tetap masih membutuhkan otorisasi dari pejabat OPD terkait begitu, ini jelas mengganggu dan ini ambigu.

Saya rasa itu saja Pak yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Walaikumsalam warahmatullah.*

Terima kasih, Pak Agung.

Pak Rifqi.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Ketua saya antre Ketua. Ikut, kanan, kanan antre.

**F-PDI PERJUANGAN (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan dan Anggota Komisi II,  
Pak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran,

Yang pertama Pak Menteri, saya kira dalam waktu yang kurang dari 6 bulan ke depan sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023, di mana PP Nomor 49 Tahun 2018 memberikan norma kepada kita untuk menghapus



seluruh pegawai *non-ASN*. PP itu perlu kita revisi dengan segera, agar *principle guidance* yang disepakati oleh banyak pihak termasuk masukan dari DPR, agar tidak ada PHK massal, itu segera mendapatkan kepastian kepada anak bangsa. Saya mendorong ini adalah kado untuk Lebaran Idul Fitri tahun 1444 Hijriah dari pemerintah kepada rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia.

Seiring dengan itu, saya meminta agar intervensi digital yang sudah dilakukan oleh Mas Anas selama menjabat sebagai Menpan-RB itu juga bisa diberlakukan. Bukan hanya untuk mendata berapa jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia, tetapi juga untuk memastikan dasar hukum keberadaan para honorer itu harus tersentral di Kemenpan-RB dan BKN. Jangan sampai *day to day* setiap hari terlalu mudah para pejabat di Republik ini yang sebetulnya tidak memiliki alas yuridis untuk menjadikan seseorang honorer itu mengangkat honorer, yang akan menjadi beban terus-menerus siapa pun Menteri dan siapa pun yang duduk di Komisi II DPR RI ini dari periode ke periode.

Saya menaruh empati sangat besar kepada Kementerian PAN-RB ini, karena Kementerian ini diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak dia lakukan terkait dengan honorer di seluruh Indonesia. Dilakukan di seluruh pemerintah daerah, dilakukan di kementerian/lembaga yang dalam banyak case itu dilakukan hanya atas dasar kemanusiaan dan kasihan.

Saya tidak ingin menggunakan kata yang lebih kasar daripada ini, ini bulan Ramadan, kita berkewajiban untuk menjaga perilaku tutur kata, tetapi itulah kenyataannya bahwa ada kondisi objektif di beberapa kementerian/lembaga lebih dari 50%, tenaga *non-ASN* yang menyokong kementerian/lembaga itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Ambil contoh, Kementerian PUPR di balai-balai di Indonesia, hampir 50% adalah pegawai *non-ASN*, kalau kemudian kita hapuskan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018, maka visi presiden termasuk Undang-Undang RPJMN kita itu *enggak* jalan terkait dengan aktuasi infrastruktur.

Tetapi di banyak tempat kita juga tahu, ada sarjana yang tidak *matching* dipaksakan bekerja pada pos-pos tertentu. Yang pengangkatannya tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar.

Nah untuk merapikan ini semua, saya kira intervensi digital bisa membantu. Kalau memang dia tidak ada di database dan dia tidak diotorisasi oleh Kementerian PAN-RB dan BKN, dia bukan tenaga *non-ASN* yang di-*accept*-kan oleh negara. Karena kalau tidak, hari ini kita bicara 2,3 juta, besok hari akan menambah menjadi 2,5, lusa bisa menjadi 2,7, akhir tahun menjadi 3,5.

Dan yang terakhir, yang perlu juga kita pikirkan selain kawan-kawan honorer harus kita selamatkan, jangan sampai pikiran kita terkuras hanya untuk honorer, sementara kawan-kawan kita, adik-adik kita *fresh graduate* yang juga

memiliki hak untuk menjadi bagian dari birokrasi negara, itu terkalahkan formasinya hanya karena kita memfokuskan pada persoalan ini.

Karena itu 2,3 juta posturnya harus kita bedah secara sungguh-sungguh dan saya mendorong tidak perlu takut kemudian untuk tidak populer mengangkat mereka. Mohon maaf tidak meng-*accept*-kan mereka, yang memang tidak linier dengan kebutuhan birokrasi kita. Karena itu juga adalah hak bagi kawan-kawan yang lain di luar *non-ASN* untuk masuk dalam birokrasi kita dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara.

Terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Waalaikumsalam warahmatullah.*

Terima kasih, Pak Rifqi.

Pak Teddy.

**F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan,  
Temen-temen Anggota,  
Pak Menteri dan jajarannya,

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman, mungkin ini juga dalam bentuk penegasan kepada Pak Menteri. Yang pertama kaitan dengan prinsip yang tadi, *guidance* prinsip dari PHK massal, kemudian hindari pembengkakan anggaran, tidak memberi pendapatan yang diterima saat ini, kemudian sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau sesuai dengan regulasi yang ada ini agak susah, artinya ini tabrakan sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada.

Karena itulah kemudian kaidah, tapi saya juga mungkin ini perlu mengeksplorasi tidak ada, saya yakin kita lakukan ini dengan niat yang baik tentunya Pak Menteri juga demikian. Tapi kemudian kan kalau kita tidak memiliki langkah-langkah desain sebagai apa kedepannya mau seperti apa, itu juga kan sulit juga rasanya.

Kalau kita tidak-tidak-tidak akan masuk kecuali kalau kita tahu pintu keluarnya. *Nah*, karena itulah kemudian menurut saya, ini yang perlu di kita bedah secara lebih luas lagi, karena kalau kita melihat pada prinsip ini sebenarnya juga ini adalah membiarkan kondisi yang ada saja. Kalau kita dengan *guidance* seperti ini misalnya, *guidance principle* artinya kondisi seperti ini ya tetep seperti ini. Ya tetap seperti ini walaupun juga kita memahami bahwa yang numpang hidup dari negara ini kan banyak dan bahkan saya meyakini bahwa yang menjalankan apa ekonomi kita ini kan masih berkaitan dengan uang-uang negara juga. Termasuk kita juga yang hadir disini juga demikian numpang dari negara juga, termasuk tenaga-tenaga honorer dan sebagainya.

Satu kebijakan ketika kemudian ini tidak dibarengi dengan dasar-dasar yang baik walaupun kebijakan itu baik itu berimplikasi. Saya masih ingat ketika saya di daerah itu, ketika ada larangan untuk rapat di hotel bagi para ASN dan sebagainya. Itu mungkin baik kebijakannya, tapi kemudian banyak juga para penyelenggara hotel dan yang lain sebagai tempat-tempat yang datang pada kami, waktu saya masih di daerah ujung-ujungnya adalah mereka mem-PHK atau merumahkan sebagian besar karyawannya dan ini kan berimplikasi ke sana. Akhirnya kemudian kebijakan itu tetap dibuka kembali dengan ada batasan-batasan tertentu yang kemudian itu dipahami untuk dibuka.

Kalau kemudian juga penanganan ASN ini kita juga tidak memiliki desain, saya sering katakan juga ketika saya masih ingat ketika waktu Menteri Pak Tjahjo *Almarhum Allahyarham*, saya mengatakan kita harus punya desain. Kalau kemudian ini adalah benang kusut, maka kita coba untuk urai satu per satu, kecuali kalau kita juga punya kebijakan gunting itu tadi, gunting saja pusing-pusing amat kita gunting saja. *Nah* ini, tapi ini juga tidak selesai karena ini adalah implikasi-implikasinya sangat banyak.

*Nah*, uraian yang saya minta waktu itu kita mulai dari tenaga kerja tingkat 2 seperti apa. Pak Menteri sudah sampaikan di sini dan ini perlu kita ketemu. Mungkin juga Pimpinan saya usulkan mungkin, apakah kita bentuk timja, tim kerja untuk menyelesaikan atau kalau tidak Panja untuk penyelesaian tenaga kerja honorer tingkat 2. Ini yang jumlahnya memang tinggal 160 ribu lagi dan ini juga masih banyak yang tenaga-tenaga administrasi mungkin ya Pak Menteri.

Karena ini sudah bahasa saya dengan Pak Menteri yang lalu Pak Tjahjo Kumolo adalah ini kalau bayi udah bayi kandung lahir dan harus diselesaikan memang. *Nah* kemudian baru kita beranjak kepada penyelesaian tenaga kerja honorer berikutnya, yang itu tenaga atau *non* ASN-lah yang kita sebut sekarang seperti apa.

*Nah* ini juga saya terus terang dari Pak Menteri juga sekaligus ini bertanya, seperti apa desain-desain seperti apa, *nah* ayo kita bicarakan supaya selesai, tapi tidak menimbulkan kebijakan-kebijakan yang di tahun politik ini, yang memang tadi saya sepakat terjadi kegaduhan yang luar biasa, akhirnya berdampak pada ya capaian-capaian target yang diemban oleh Pak Presiden Jokowi itu menjadi terganggu.

Saya setuju tadi kaitan dengan digitalisasi walaupun ini juga memang perlu pemilihan umum bertahap tidak langsung sekaligus, karena ini banyak juga yang numpang dari sini juga Pak Menteri, tidak sedikit yang numpang dari sini juga.

Kalau kita bedah saja mungkin setahunnya di Indonesia ya jumlahnya fantastis, mungkin bisa ratusan triliun. Walaupun juga ini tetap juga ya ini juga bagian dari memang kebijakan yang-yang yang harus kemudian kita lihat secara kontekstualnya seperti itu, karena realitasnya memang demikian.

Kalau kemudian seperti halnya juga kebijakan larangan tadi rapat di hotel atau kebijakan kunjungan kerja katakanlah dilarang di seluruh Indonesia, saya yakin juga banyak maskapai yang dan hotel yang kemudian jadi persoalan.

*Nah* ini ya contoh-contoh demikian, mungkin ini juga yang perlu kita coba untuk kita bicarakan sehingga nanti desain ke depan, paling tidak kalau kita tidak bisa menyelesaikan *totally* seluruhnya. Tapi sebagian besar sampai dengan target-target yang kita capai tanpa mengorek kemudian kita ingin birokrasi yang handal, yang lincah dan sebagainya, ini juga perlahan-lahan ya kita geser. Karena menurut saya juga kita susah juga untuk memasarkan *totally* 100% ketika kita berbicara realitasnya seperti itu.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.*

Pak Haruna udah datang, silakan.

**F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang kami hormati Pak Ketua dan,  
Teman-teman, Pak Menteri beserta jajaran,

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Di halaman 43 Pak, pemerintah merancang tahun 22 ini kemarin penghematan uang negara 9,9 triliun. Ini ke pasal-pasal tidak, artinya masukkan. Sekarang ada uang Pak di BPJS tenaga kerja 328 triliun, ini bisa masukkan buat presiden, kenapa Bapak tidak bantu BPR Se-Indonesia tidak ada juknisnya Pak. 1.450 BPR konvensional, 250 BPR Syariah.

Kalau kita kasih 1.650 per-10 miliar per-bank, itu kan bisa dicairkan ke debitur sebanyak 13.200.000,00 bukan menghilangkan, mengobati pengangguran Pak, mengobati kemiskinan 50%, ini belum ditemukan pemerintah jalan keluar. Jadi cuma 16,7 triliun Pak membantu BPR se-Indonesia, saya tanya orang kerjanya dia bilang tidak punya juknis lagi, ini tidak ditemukan.

Ini bukan (suara tidak jelas ... 01.51.14) bukan, baru nanti itu diasuransikan Pak, diAskrindokan Pak kredit yang 5 juta. Mau 2,4 cuman 200 per-tahun berarti resiko dari APBN tidak ada, karena kata pemerintah tadi penghematan ini yang tidak ditemukan.

Jadi kalau 3.300.000,00 Pak kali 5 juta cuman 16,7 triliun. Jadi kalau Bapak bantu 20 miliar habis miskin, karena BPR cuma 26-27 miskin di Indonesia, bantu BPR 20 miliar Pak miskin habis, apalagi kalau cuman orang-orang, itu yang pertama Pak.

Yang kedua, perpanjangan izin Pak. Kan itu yang pemerintah perpanjangan izin juga untuk mengetahui membikin NIB, Nomor Induk Berusaha. Kan aturannya waktu pendirian sertifikat tanah, KTP, NPWP, PBB. Kalau bisa Pak ini nomor 6 dihapus, IMB Pak. Tidak mungkin ada perusahaan lama tidak ada IMB-nya, sebab (suara tidak jelas ... 01.52.19) Pak, seperti di dapil saya. Tokoh mendirikan politeknik disuruh bikin IMB ulang, kalau bisa ini dihapus Pak IMB. Kan tidak mungkin ada perusahaan tidak ada bangunannya, ini yang kedua Pak.

Saya kira cuma dua itu Pak Ketua.

Sekian.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,  
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Walaikumsalam warahmatullah.*

Terima kasih, Pak Haruna.

Pak Heru.

**F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):**

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,  
Selamat siang,  
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi II yang saya hormati,  
Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Saya baru saja kembali ke Komisi II, jadi barangkali ada yang lupa nama saya Heru dari Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil VII Jawa Tengah. Bukan untuk kampanye untuk dipilih karena Pak Menteri bukan dapil saya.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ke Pak Menteri. Kalau masa tugasnya kalau saya hitung mungkin kurang lebih hanya 1,5 tahun, kalau dihitung sampai periode Pak Presiden selesai. Ini bisa menjadi merupakan beban yang sangat berat buat beliau, tapi bisa juga menjadi masa-masa untuk berbuat kemuliaan untuk orang banyak. Jadi selamat untuk beliau, beliau pejabat daerah yang sukses sampai sekarang jadi Menteri.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan masukan atau pandangan. Dalam pandangan saya pegawai *non-ASN* atau honorer atau apapun namanya mereka adalah korban, mereka objek bukan subjek. Kalau didekati secara aturan ada yang diangkat secara sah sesuai aturan itu, ada yang diangkat bisa saja dianggap tidak sah. Tetapi sah atau tidak sah bukan kemauan mereka. Bisa saja daerah disalahkan tapi daerah juga punya alasan. Bisa saja ini menjadi masalah yang terus menerus seolah-olah tidak pernah selesai, tapi bukan maunya para honorer mereka menjadi masalah. Dan kebetulan yang disebut pegawai *non-ASN* dan/atau honorer itu mereka manusia semua.

Mohon maaf, saya bicara seperti mereka, saya ulang mereka itu manusia semua ya, yang merupakan objek, yang merupakan korban. Apapun dan bagaimana pun prosesnya mereka menjadi pegawai honorer. Saya katakan korban, karena konon yang disuruh bayar pun terpaksa mau jadi honorer. Saya yakin bukan karena mereka mampu membayar, terpaksa membayar.

Pak Menteri pernah jadi bupati, pasti tahu lah yang seperti ini. Saya yakin bukan-bukan bupati yang main, tapi ada juga orang lain yang bermain, anggap aja ini sinyalemen.

Terlalu panjang kalau saya lanjutkan, sudah banyak dari kawan-kawan. Jadi pendekatan kita saya pikir tidak sekadar pendekatan administratif, tidak sekadar pendekatan hukum, tidak sekadar bicara efektivitas dan efisiensi, tapi saya ingin mengajak bicara kemanusiaan, mereka manusia semua. Banyak yang sudah puluhan tahun, banyak menjadi honorer sejak dari masih belum berkeluarga sampai sekarang anaknya 2 atau 3.

Sekarang sebagian agak beruntung karena ada yang digaji sesuai dengan upah minimum, tapi ternyata masih ada yang terimanya 100, 200, 300 per-bulan. Jadi mereka butuh pertolongan, butuh kemanusiaan yang adil dan beradab, butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, butuh kearifan kebijaksanaan. Mudah-mudahan Pak Menteri punya peluang untuk melakukan seperti itu, walaupun saya tahu beliau bukan pemegang otoritas mutlak tentang hal itu, saya tau, saya paham.

Oleh karena itu, saya katakan beliau punya kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Menteri berhasil.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Waalaikumsalam warahmatullah.*

Terima kasih, Pak Heru.

Pak Toha.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Terima kasih, Ketua.

Mohon maaf terlambat karena pesawat muter-muter di halim itu 1,5 jam.

Pak Menteri yang saya hormati,  
Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,

Pak Menteri itu dulu senior saya di Komisi V dulu, saya masuk tapi beliau sudah keluar jadi bupati.

Apa yang disampaikan oleh temen-temen, saya simak di jalan tadi, saya pikir sudah cukup. Saya akan menyampaikan aspirasi dapil Pak Menteri, meskipun aspirasi terjadi di seluruh Indonesia.

Jadi ceritanya, jadi ceritanya ada tenaga honorer sudah test CPNS akan tetapi sampai sekarang 2013, tapi sampai sekarang belum dapat SK ini yang lucu. Yang sudah pasti saja *enggak* pasti, apalagi yang belum pasti, ini menjadi persoalan. *Nah* ini saya ceritakan kronologisnya, ini yang terjadi di Klaten tapi terjadi di semua kabupaten ya meskipun proporsinya tidak-tidak sama di kabupaten.

Jadi permasalahannya mohon maaf Ketua, 2 menit mungkin saya bacakan ini. Kronologis K2 CPNS tahun 2013 Kabupaten Klaten yang belum terima SK CPNS, bahwa bersama ini kami K2 Kabupaten Klaten para pengugat menyampaikan kronologis terkait dengan permasalahan kami yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS pada tahun 2013, akan tetapi belum terima SK sampai saat ini, yang pertama.

Saya minta 2 menit untuk membacakan ini, saya aspirasi dapil saja.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Enggak* begini, kalau begitu itu banyak Pak kasusnya begitu, semua. Maksudnya, tadi sudah sampaikan itu kan, ya sudah-sudah cukup itu tadi maksudnya, semuanya. Yang lain-lainnya itu apalagi bawahnya?

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

*Enggak*, maksud saya ini ada kronologisnya kayak apa begitu loh Pak pemrosesan dari BKN, kanreg, kemudian bupati hubungannya dengan Kemenpan-RB dan sebagainya maka saya minta waktu 2 menit untuk membacakan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Ya sudah, 2 menit.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Ya, dan ini terjadi di mana-mana dan ini contoh kasus saja di Klaten begitu.

Bahwa pada bulan Juli 2012 telah diadakan uji publik untuk mencari kebenaran data-data dari tenaga honorer K2 yang berjumlah 2.572 di lingkungan Pemkab Klaten. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2017, kami menerima surat undangan, yaitu berupa undangan pengambilan kartu test seleksi CPNS tahun 2013 untuk tenaga honorer kategori 2, serta menerima pengarahan dan pembekalan dari bupati. Selanjutnya kami mengikuti ujian seleksi CPNS tahun 2013 formasi tenaga honorer kategori 2.

Yang kedua, bahwa kemudian berdasarkan surat Menpan-RB Nomor B sekian-sekian-sekian tanggal 9 Februari 2014, pengumuman kelulusan seleksi CPNS tahun 2013 sebagaimana yang telah diumumkan melalui website maupun edaran resmi oleh Menpan-RB tanggal 10 Februari 2014 di mana sebanyak 1.098 orang dinyatakan lolos ujian CPNS, termasuk, tersebut termasuk kami, kami itu yang menggugat ini.

Oleh karena itu, kami para penggugat adalah tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Kabupaten Klaten yang mengikuti ujian seleksi CPNS daerah di lingkungan Pemkab Klaten untuk formasi tenaga honorer kategori 2 Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada tanggal 3 November 2013. Artinya mereka lolos, tanggal 2014 sudah diumumkan oleh Menpan-RB.

*Nah*, setelah kami dinyatakan lulus ada beberapa persyaratan yang harus kami penuhi atau melakukan pemberkasan, maka oleh karena itu pada tanggal 20 Maret 2014, ada undangan dari Pemkab Klaten, perihal pemberkasan CPNS tahun 2014 untuk tenaga honorer kategori 2 oleh Bupati ditunjukkan kepada tenaga honorer semuanya.



*Nah*, selanjutnya 14 Agustus sampai 22 Agustus dilakukan verifikasi data tenaga honorer, kemudian dilanjutkan dengan uji publik bagi tenaga honorer K2 yang lolos seleksi CPNS formasi tahun 2014.

Kemudian dari 1.098 orang tenaga honorer K2 yang telah dinyatakan lulus seleksi tahun 2013 telah diusulkan oleh Pemkab Klaten. *Nah* akan tetapi yang lolos ini dari 2013, 2013 ini hanya 764 orang tenaga honorer K2 yang dikeluarkan atau diterbitkan SK CPNS-nya, sedangkan 296 orang ini belum diterbitkan SK CPNS-nya. Jadi sama-sama lulus tapi yang apa namanya 764 sudah diterbitkan SK, kemudian yang 296 belum diterbitkan SK.

*Nah*, akhirnya 2000, masuk ke PTUN dan lain sebagainya karena kejar-kejar ini *enggak* sampai terus, PTUN menang-menang-menang sampai-sampai kasasi menang, akan tetapi sampai sekarang belum juga belum di apa namanya belum diterbitkan SK CPNS-nya.

*Nah* nanti, kemarin sudah apa berkasnya sudah saya sampaikan ke Sekretariat Komisi II berkasnya, nanti kita sampaikan ke Pak Menteri untuk dipelajari.

Jadi maksud saya begini Pak, sebelum *road map* perencanaan Pak Menteri ke depan itu mau apa. Menpan-RB itu selesaikan dulu permasalahan-permasalahan, keranjang-keranjang sampah yang selama ini masih *ngotori* Menpan-RB untuk bisa diselesaikan semuanya. Saya pikir itu.

Terima kasih, Ketua.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Walaikumsalam warahmatullah.*

Jadi yang disampaikan Pak Toha ini kasus bukan, kasus lagi bukan, kasus juga bukan?

**F-P. GERINDRA (Drs. SUPRIYANTO):**

Sebentar Pak, paling 1 menit, 2 menit barangkali.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

Pimpinan,  
Bapak/ Ibu,  
Pak Menteri yang saya hormati,  
Peserta rapat yang berbahagia,

Jadi saya pikir begini, Pak Menteri ini kan mantan Bupati, yang mesti Bapak yakini itu satu bahwa misalkan ini saya bicara tenaga honorer saja. Tenaga honorer itu perlu atau tidak menurut Bapak? Kalau kita di lapangan ya kan. Bapak bicara di Banyuwangi, di Jember, di Pasuruan, ini tenaga honorer ini masih perlu apa tidak? Itu keyakinan itu yang harus ditimbulkan.

Kalau menurut saya, sepengetahuan saya bahwa tenaga honorer itu masih diperlukan karena tenaga ASN-nya kurang, itu yang mesti diyakini. Kalau itu sudah diyakini maka tugas Bapak barangkali harus menyelamatkan yang tertinggal ini bukan merancang yang bagus-bagus. Oke lah yang bagus dirancang, tapi bagaimana Bapak menyelamatkan kebutuhan dan keadaan honorer, ini yang harus dipertimbangkan.

Jadi mesti yang perlu dipertimbangkan utama itu selamatkan honorer dulu, karena itu yang dibutuhkan. Jadi keyakinan dulu dibutuhkan atau tidak. Kalau itu dibutuhkan Bapak itu harus selamatkan, itu pertama. Yang kedua, kalau kondisi honorer ini memprihatinkan, sudah bekerja lama, sudah terlanjur di situ tolong ini selamatkanlah.

Saya kira itu Pak, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih, Pak Supriyanto.

Terakhir Pak Yanuar.

**F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat,  
Bapak Menteri beserta segenap jajaran,

Ini mungkin *enggak* lama, tapi saya memberikan beberapa kata kunci saja Pak Menteri karena ini penting untuk di-*follow up* berikutnya. Pasti hari ini kita tidak bisa mendalami seluruh isu yang tadi kita bicarakan secara lebih detail, sehingga ke depan perlu lagi waktu khusus Pak Ketua untuk pembicaraan lebih lanjut, itu yang pertama.

Yang kedua, hari ini saya mencatat 5 hal *pointers* yang kita bicarakan, yang pertama penyelesaian tenaga *non-ASN*, yang kedua reformasi birokrasi tematik, yang ketiga transformasi pelayanan publik ini sangat digitalisasi, yang

keempat perlunya mulai perhatian terhadap ASN keparlemenan, artinya ASN ke lembaga legislatif, dan yang kelima revisi RUU *eh* revisi Undang-Undang ASN. Jadi ini lima-lima hal penting yang kita bicarakan.

Kalau dirunut maka *ending* legislasinya adalah BKD bisa diselesaikan di revisi Undang-Undang ASN menurut saya atau *core point*-nya pada akhirnya adalah di Undang-Undang ASN bisa lebih kuat. Undang-Undang tenaga honorer ya reformasi birokrasi tematik, transformasi digital, terus juga bagaimana memberikan perhatian yang lebih kuat kepada ASN legislatif, itu yang kedua Pak Menteri.

Yang ketiga, tentu saja pada setiap *item* ini, perlu ada terobosan-terobosan yang menarik saya kira. Kenapa terobosan ini penting, supaya kita tidak menyelesaikan masalah ataupun menunjukkan masalah-masalah baru. Saya ambil contoh misalnya, reformasi birokrasi tematik. Ini kan trauma kita adalah ada slogan, ada jargon, ada yang terlalu dominan selama ini sehingga ke depan kan perlu ada perbaikan.

Contoh misalnya reformasi birokrasi penanggulangan kemiskinan. Ini kan kalau kita sebut isu maka itu akan merubah target, akan merubah cara kerja, merubah strategi, merubah *mindset*, merubah mental, merubah pola kerja, mengubah hubungan antar hanya khusus untuk bagaimana menanggulangi kemiskinan. Jadi kalau mau diteliti lebih dalam lagi itu mesti aspeknya banyak sekali.

*Nah*, saya menyarankan bahwa, ini jika mau serius itu di *drive* ulang lagi, diturunin sampai ke level yang lebih-lebih bawah. Karena kalau visi berubah otomatis target kerja berubah, cara kerja berubah, pola kerja berubah, persyaratan SDM juga berubah. *Nah*, saya penting memberitakan ini supaya kita tidak lagi terjebak kepada slogan-slogan di masa lalu.

Karena kalau dulu kan gampang sekali Pak Menteri, oh kita mau bikin apa pokoknya pariwisata maju, wah Indonesia maju pariwisata tapi di bawah, di prakteknya *enggak* Nampak. Artinya tidak nampak penyesuaian terhadap slogan seperti itu, sehingga ini tidak boleh lagi terjadi.

Yang terakhir, mungkin yang ingin saya sampaikan, saya memberikan apresiasi ini prinsip dasar tenaga honorer ini meskipun *enggak* gampang ini prinsip dasarnya rumit juga Pak Menteri. Bagaimana tidak ada pembengkakan anggaran, tapi menghindari tenaga massal, kesejahteraan ASN-nya tidak berkurang dan seterusnya.

*Nah*, ini kan satu hubungan yang rumit menurut saya, tapi dengan menyampaikan ini saya yakin dan percaya Pak Menteri dan temen-temen di Menpan-RB ada *way out* atau jalan keluar yang tentang soal ini. Karena apa? Karena tentang ini penting untuk memberikan *legacy* di forum ini tapi juga memang jawaban atas ini diganti oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia.

Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah kabar baik bahwa penyelesaian tenaga honorer atau ASN itu tidak memberikan kekecewaan kepada terutama *stake holder non-ASN*. Karena itu izin nanti pendalaman ini saya kira juga harus menjadi bagian dari penguatan revisi Undang-Undang ASN ke depan.

Jika target apa November ini adalah waktu yang harus diputuskan, maka sebelum November berarti Undang-Undang ASN juga mudah-mudahan bisa kita diselesaikan, sehingga masuk kepada bulan November itu secara legislasi semuanya bisa kita bereskan, termasuk di dalamnya soal ASN legislatif.

Saya kira itu saja sebagai *note* catatannya.

Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, Anggota.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**F-PDI PERJUANGAN (RIYANTA S.H.):**

Izin Pimpinan nambahin sedikit.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Sedikit aja ya Pak, kita soalnya jam 1 sudah ada rapat Menteri ATR BPN, lagi.

**F-PDI PERJUANGAN (RIYANTA S.H.):**

Baik, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Silakan.

**F-PDI PERJUANGAN (RIYANTA S.H.):**

2 menit saja. Yang pertama,

Rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia yang saya hormati,

Intinya bahwa, DPR RI bersepakat dengan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 5 2014. Mohon nanti Pak Menteri untuk bisa disampaikan kira-kira substansi apa yang bisa menyelamatkan tenaga honorer itu.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Walaikumsalam warahmatullah,*

Baik Bapak/Ibu sekalian,  
Saudara Menteri,

Tadi sudah mendengarkan semua banyak sekali 13 orang yang menyampaikan pandangan, masukkan.

Kami persilakan sebelum kita masuk ke kesimpulan.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Izin, Pak Ketua.

Terima kasih atas masukan, pertanyaan, kritikan dari Ketua, dari Pak Junimart, kemudian dari Pak Syamsurizal, Pak Gaus, Pak Endro Suwanto, kemudian Pak Cornelis, Pak Wahyu, makasih Pak Wahyu nanti kami jawab Pak Wahyu. Kemudian Pak Agung, Pak Teddy, Pak Rifqi, Pak Haruna, kemudian Pak Heru terima kasih, Pak Toha, Pak Supriyanto, kemudian Pak Yanuar, dan terakhir Pak Riyanta.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Pertama, bagi kami honorer itu penting untuk pelayanan publik. Jadi kami tidak akan jawab semuanya karena waktunya pendek tapi kita nanti akan kami jawab tertulis. Jadi sangat penting untuk pelayanan publik.

Khusus untuk DPR, Pak Sekjen nanti kami minta intens komunikasi dengan Bu Rini. Saya tanya, pernah *enggak* komunikasi dengan Bu Rini? Ternyata belum. *Nah*, belum komunikasi *nah*, perlu intens kira-kira.

Jadi begini, tapi nanti dengan urusan tadi kami kaji. Kenapa ini kemarin tidak segera tereksekusi, karena ada arahan dari Wapres sebagai pembina KPR BN, bahwa tukin hanya bisa naik kalau penyederhanaan birokrasinya jalan. Tapi tadi Pimpinan minta DPR dikecualikan. Mudah-mudahan tidak ada lembaga lain semua minta dikecualikan, termasuk kemarin Menkopolkam, Pak Mahfud minta dikecualikan, kami tidak sampaikan langsung karena nanti akan menjadi preseden bagi tempat lain.

*Nah*, izin sementara DPR ini ada, Sekjen DPR dari total 203 jabatan struktural Eselon III dan IV yang diusulkan untuk disederhanakan hanya 8 jabatan Eselon IV atau 4% dari total jabatan yang dapat apa namanya disederhanakan.

*Nah*, oleh karena itu, maka kemarin teman-teman masih melihat ini nanti harus disampaikan ke tim KPR BN Wapres. Jadi kami harus sampaikan Pak bahwa DPR perlu mendapat pengecualian. Karena beberapa kami mendapatkan teguran karena penyerderhanaan birokrasi ini harus jalan. Tetapi jika ini sesuatu yang sangat *urgent* karena pelayanannya agak berbeda, nanti kami akan minta izin khusus di DPR kami akan kami sampaikan. Nanti kami akan kami komunikasi Pak ya dengan Bu Sekjen.

Saudara sekalian,

Terkait dengan penerimaan CPNS, ini kan sekarang yang-yang kita yang dijalankan hanya di Mahkamah Agung oh *sorry*, di Kejaksaan Agung, BIN dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kalau jaksa kan tidak mungkin honorer, jaksa harus ASN jaksa, *sorry* PNS, PNS, tidak boleh PPPK, yang lain boleh PPPK tapi jaksa tidak boleh PPPK.

Lalu begitu juga hakim, hakim tidak bisa PPPK, hakim juga harus PNS makanya harus jadi prioritas, karena kekurangan hakim begitu besar dan tidak bisa diganti oleh PPPK, begitu juga di BIN. Inteljen tidak boleh PPPK.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Ketua, izin Ketua.

Pak, itu hakim itu bukannya hakim *ad hoc* ya, itu statusnya apa?

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Itu berbeda lagi, ini yang hakim yang untuk di daerah-daerah, untuk pengadilan lain-lain.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Pengadilan umum?

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Iya, pengadilan umum. Jadi ini perlu ada di beberapa daerah pengadilan kekurangan hakim sehingga ini dan tidak mungkin direkrut dari PPPK kira-kira begitu.

*Nah*, terkait dengan ASN yang ada di Kementerian ini, di DPR nanti kami akan kaji dan kami akan diskusikan.

Begitu juga terkait dengan IPDN, terima kasih masukannya nanti akan kami kaji kembali dan akan kami jawab secara tertulis.

Pimpinan yang saya hormati,

Terkait juga dengan data ASN yang tidak *valid*. Jadi kita sudah meminta SPTJM kepada semua PPK dan audit dapat PKN dan BPKP, jadi ini kita minta kepada BPKP untuk mengaudit data ini.

Memang Pak, saya ini sering saya sampaikan, saya ini kalau pemain bola masuk di babak kedua menit ke-13, *nah* urusannya banyak. Tidak mungkin semua kami beresin, maka kami punya 7 skala prioritas yang harus kami beresin.

Sekaligus kami menjawab Pak Wahyu yang tadi pencitraan. Jadi 3 bulan pertama Pak Wahyu kami beresin adalah sistem kepegawaian. Pak Wahyu, data kepegawaian kita ini anomali kemarin. *Alhamdulillah* dengan kerja keras bersama BKN dan tim sekarang sudah 98,2% Pak Wahyu, kita beresin tentang data kepegawaian.

Yang kedua Bapak, Ibu sekalian, ASN kita selama ini mengurus pindah mutasi, kenaikan pangkat, kemudian urus pensiun itu rumit Pak Wahyu, rumit setengah mati. *Nah*, kita pangkas dari 14 proses bisnis sekarang sudah kita pangkas tinggal 3. *Alhamdulillah* sekarang mudah, Pak Wahyu. Kalau Bapak temukan mungkin kami bisa langsung sampaikan ke kami. Inilah arahan dari Pimpinan yang pertama agar *customer-customer* internal ini kita beresin dulu.

Yang kedua Pak Wahyu, yang kedua urusan JF, Pak Wahyu. Kita keliling ke mana-mana JF ini rumit. Ada orang guru mengajar setelah ngajar pusing ngisi angka kredit, bagaimana mungkin guru mengajar kok disibukkan urus angka kredit. Kita beresin di 3 bulan pertama Pak Wahyu. *Alhamdulillah* dengan tim Kemenpan dan BKN dan Diknas ini bisa beresin ini, Pak Wahyu. Maka sekarang inilah 7 prioritas kami Pak Wahyu yang kami sebagaimana arahan Pimpinan Dewan juga yang kami beresin, termasuk tadi menyelesaikan soal. Coba ditayangkan pemangkasan proses bisnis kepegawaian.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Izin Pak Menteri.

Ketua izin Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Silakan.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Saya-saya sebenarnya sependapat dengan Pak Menteri, cuma yang saya bingung itu sekarang ini seringkali overlap dengan BKN, data pegawai Pak. Seharusnya kalau data pegawai itu kan fokus itu sudah dikerjakan oleh BKN. Apa karena BKN itu PLT sepanjang terus itu kan.

*Nah, saya sebenarnya usul Ketua, kita harus segera membentuk Panja terkait hal ini antara BKN dan Menpan-RB ini. Ini saya lempar terus, formasi dibidang Menpan begitu, dari Menpan lempar ke BKN. Begitu kita tes, tanya ke BKN dia bilang ke Menpan, begitu dari Menpan lempar lagi ke BKN. Sampai saya pernah bilang itu ke Ketua BKN ini, "Bapak ini kaya kantor pos aja" saya bilang.*

Kita-kita, kita tuh sekarang lebih *enggak* paham lagi sebenarnya antara tugas tupoksi BKN dan Menpan-RB sebenarnya, ini kan kaya *overlap*. Kalau dulu mau bilang mau memba apa membubarkan Komisi KASN, KASN itu jauh di antara ini. Yang *overlap* itu sekarang adalah BKN dan Menpan-RB.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Izin Pak Ketua, izin.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Baik, silakan.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Terima kasih.

Jadi BKN itu di bawah koordinasi Kemenpan-RB. Jadi sebenarnya tidak ada tumpang tindih. Cuma kita minta pendataannya kemariin diberesin. *Alhamdulillah* Anggota Dewan yang terhormat ini sudah 98,2% sehingga datanya selesai.

Yang berikutnya terkait MPP digital. Tidak ada proyek MPP untuk digital. Jadi MPP digital ini adalah aplikasi berbagi pakai yang sekarang disiapkan oleh LMSW, kemudian Telkom, kemudian Kementerian BUMN menyiapkan sehingga nanti daerah tinggal pakai Pak Wahyu, tidak perlu beli, sehingga tidak benar kalau ini ada proyek kira-kira begitu.

Apa kaitannya dengan investasi, investasi ini yang mengerjakan pelayanan publiknya adalah ASN. Memang aturannya dari berbagai kementeriannya tapi penyelenggaranya ASN. Oleh karena itu maka, kalau penyelenggaranya ini jalan dengan baik, reformasi birokrasinya jalan, maka pelayanannya akan cepat, sehingga ini kami lebih ke tata kelolanya.

Terus apa urusannya dengan kemiskinan?

Jadi Bapak sekalian yang saya hormati,  
Jadi Anggota Dewan,  
Pak Wahyu yang kami hormati,



Sekarang teman-teman berbondong-bondong nilai RB-nya naik Pak Wahyu, maka banyak konsultan-konsultan yang diundang supaya nilai RB-nya supaya rapat-rapat di hotel tadi. *Nah*, kalau ini terjadi, RB nilai naik berapapun ini jangan-jangan sibuk di administrasi Pak Ketua, tidak menambah dampak ke rakyat, jadi bagus, harus meng-*upload*.

Coba silakan disampaikan bagian penilaian RB yang kita ubah ini Pak Wahyu. Jadi ini bukan soal pencitraan, jadi ini memang metode. Saya dahulu waktu jadi Bupati ribet untuk dapat RB baru, harus konsultasi ngisi macam isianya banyak sekali. Isianya 259 komponen, ribuan harus di-*upload* karena dulu sibuk di hulunya. *Nah*, sekarang kita ingin berdampak, maka kita langsung fokus. Kalau daerah RB-nya mau naik ya kemiskinannya harus turun kira-kira begitu. Kalau kemiskinannya *enggak* turun, maka nilai RB-nya *enggak* bisa naik karena dampak.

Yang kedua investasi harus naik, jadi kami lebih fokus ke dampak. Jadi RB ini sekarang banyak sekali teman-teman ingin nilai RB dinaikkan ujungnya supaya tunjangan kinerjanya naik. *Nah*, supaya tidak sibuk di hulunya, di hilirnya maka kita langsung sekarang bikin RB tematik dan ini sudah kita sosialisasikan.

Terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, itu bukan ide kami. Kebetulan saya masuk, Perpresnya keluar. Sudah 2 tahun SPBE ini *enggak* di-*teken* oleh Presiden. Begitu kami menyampaikan, Pak Presiden di seluruh negara kalau SPBE-nya bagus, mungkin bisa ditampilkan. Maka ini berdampak ke indeks korupsinya juga akan bagus, tata kelola pemerintahan akan bagus, *nah* maka kemudian Bapak Presiden menandatangani Perpres ini ketika, sehingga.

**INTERUPSI F-PDI PERJUANGAN (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H.):**

Rifqi, izin Ketua.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Sehingga kami.

**INTERUPSI F-PDI PERJUANGAN (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H.):**

Pak Menteri izin, kembali ke RB tadi.

Saya sepakat dengan 26 indikator penyederhanaan dari 250 sekian, kembali kepada kebutuhan kami di Kesekjenan DPR RI. Kalau kita buka RB itu indikatornya adalah kemiskinan, investasi, maka tentu Kesekjenan DPR RI itu tidak kompatibel RB-nya, karena tadi kita bicaranya kan bagaimana zona integritas, WBK, WBBM, tukin dan seterusnya hadir di kesekjenan kami.

*Nah*, karena itu, ini sekaligus ini bagus tapi mungkin dalam beberapa hal terkait dengan tugas, fungsi kelembagaan tertentu ini *enggak* tidak bisa dipakai. Untuk DPR nanti tolong Bu Sekretaris kita rumuskan bersama dengan Kesekjenan.

Terima kasih, silakan dilanjutkan Pak Menteri.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Silakan Pak Erwan menambahkan dikit soal ini, ya Pak Deputi RB. Agak cepet, Pak.

**DEPUTI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (PROF. DR. ERWAN AGUS PURWANTO, M.Si.):**

Mohon izin Pak Menteri,  
Mohon izin Bapak Pimpinan,  
Komisi II,  
Bapak/Ibu sekalian,

Tadi Pak Menteri menyampaikan tentang RB tematik yang terkait dengan hal-hal yang ada di hilir agar reformasi birokrasi kita ini betul-betul segera berdampak dan dirasakan oleh masyarakat.

*Nah*, terkait dengan peran Kementerian/Lembaga yang tidak apa namanya secara langsung tugasnya berkaitan dengan isu-isu tersebut, kami ada 2 *track* RB begitu Bapak. Yang pertama kita sebut sebagai RB yang bersifat *general*, artinya upaya kita memperbaiki birokrasi masih tetap berjalan, seperti juga yang terjadi di sekretariat Dewan, di Kementerian yang lain. Kemudian yang kedua tadi adalah yang kita sebut *track* RB yang tematik.

Jadi ini harapannya nanti dua *track* ini bersama-sama tadi birokrasinya juga baik dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Demikian tambahan kami. Terima kasih, Bapak Menteri.

**F- PDI PERJUANGAN (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H.):**

Izin, Pak.

Pak Menteri, Pak Deputi, saya sepakat itu, tapi kemudian ini biar tahu karena banyak sekali media juga di sini agar ini tidak digeneralisir. Karena kalau ini dimasukkan secara *generalized*, nanti seolah-olah ini nanti hanya berlaku terutama kepada kawan-kawan di pemerintahan daerah ini terutama dan di beberapa Kementerian tertentu.

Saya mendukung penuh ini RB berbasis dampak ini, tapi sekali lagi bukan hanya untuk Kesekjenan, tapi khusus Kesekjenan dan yang lain-lain.

Saya kira ini nanti perlu dipaparkan secara lebih rinci agar kita tidak *confuse* melihat indikator-indikator disampaikan.

Terima kasih.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Iya terima kasih Bapak-Bapak, jadi ini memang.

**INTERUPS F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Itu tadi menyangkut IPDN belum disampaikan secara tegas ya.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Baik, terkait IPDN nanti kami, ini menjadi masukan buat kami. Jadi kemarin ini ada usulan terkait dengan apa namanya, jadi fokus kita kemarin masih di JF ya. Jadi yang pelaksanaan sementara kemarin di-*hold* karena kita fokus di jabatan fungsional kira-kira begitu. Tapi jika ada masukkan dengan Dewan nanti akan kami bahas kembali Pak terkait dengan soal yang IPDN ini. Dan nanti secara tertulis akan kami jawab, termasuk juga dengan jawaban-jawaban yang lain.

**F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Izin, izin Pak Ketua.

Begitu Pak Menteri, kalau tertulis menurut saya tidak-tidak-tidak paripurna ya. Data yang di kami itu di Komisi II itu ada kesepakatan, ada keputusan antara Kementerian Kemenpan dengan Mendagri tentang IPDN ini dan sesuai dengan kuota yang diajukan. Dan itu ada SK dari Menteri ada itu iya kan. Kesepakatan di akhir itu menyatakan bahwa, moratorium akan dilakukan pada tahun 2024.

*Nah* kedua, kok bisa maju ke tahun 2023. *Nah*, kalau totalnya 534 itu kan jabatan fungsional, bagaimana jabatan pelaksana begitu Pak Menteri. Kan kasihan yang pada sekolah-sekolah itu, nanti pada mau ke mana mereka itu? Begitu Pak. Kasihan mereka itu mau ke mana iya kan.

Ya kalau melihat apa formasi dari apa namanya Kemenpan ini kan 534 itu 1 per- kabupaten/kota biasanya 2, 1 per provinsi biasanya 4, *nah* selebihnya ke mana ini? Kan negara sudah menyekolahkan mereka ini semua, begitu Pak Menteri. Jadi kesepakatan yang sudah ada itu tolong lah ditindaklanjuti.

Silakan Pak.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Baik Pak Ketua.

Pak Alex mau menambahkan Pak Alex?

**AJIB KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (DR. Ir. ALEX DENNI, M.M.):**

Terima kasih, Pak Menteri.

Pimpinan, Bapak/Ibu yang saya hormati,

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kalau melihat postur ASN kita yang jumlahnya 4,2 juta, 1,5 juta hampir itu adalah pelaksana Bapak. Sementara saat ini kita sedang secara masif melakukan digitalisasi melalui Perpres SPBE. Jadi dampak digitalisasi tentu akan terjadi *shifting* di dalam jabatan dan negara-negara maju yang sudah lebih dulu melakukan transformasi digital piramida ASN-nya itu sudah terbalik. Jadi bukan pelaksananya lagi yang lebih banyak karena interaksi masyarakat itu sudah lebih banyak ke digital piramidanya terbalik.

Karena itu kebijakan rekrutmen yang kami siapkan yang disiapkan oleh Kementerian Pan-RB jabatan pelaksana memang akan terjadi negatif *growth* hampir 30% dalam 5 tahun ke depan, karena dampak dari digitalisasi yang perlu kita pertimbangkan. Sementara jabatan fungsional teknis itu kita upayakan *zero growth*, pelayanan dasar seperti guru dan nakes itu memang masih *positive growth* karena memang kebutuhannya masih ada. Kira-kira itu yang membuat kami memprioritaskan dulu untuk memberikan formasi kepada jabatan fungsional dan untuk sementara memberikan izin kepada jabatan pelaksanaan, kira-kira itu tambahannya.

Terima kasih.

**F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Jadi begini, izin Pak Ketua.

Itu kan sudah kesepakatan, bahwa moratorium untuk jabatan pelaksana itu akan diterapkan pada tahun 2024. Kok bisa maju ke tahun 2023. Dan ada apa namanya keputusan Menteri mengenai ini. Itu cabut dulu dong keputusannya, kan begitu Pak. Ini kita hanya mau mendudukan yang benar, iya kan, kan begitu. Dan setahu kita itu di Komisi II surat Menteri Dalam Negeri juga ke-ke Pak Menpan mengenai ini.

Coba bayangkan seterusnya ya kan, seterusnya IPDN ini akan kosong Pak, akan kosong ya. Di tahun 2022 ada 1230 formasi, tahun 2021 111 nomor formasi. Di tahun 2023 cuman 534 formasi, di sana Pak ribuan, di IPDN ada 6 kalau saya *enggak* salah di Indonesia, itu kosong semua Pak kalau begini, iya kan? Kosong semua. Belum lagi masalah sosialisasi, ini kan sosialisasi Pak, kecuali kalau sudah ada sosialisasi dan para apa pemerintah daerah sudah paham mengenai ini, ya ini memang perlu Pak. Jadi jangan kita mengejar target ya kan, tetapi tidak-tidak mencapai *goal* yang benar Pak.

Silakan, Pak.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Nanti akan kami apa akan kami evaluasi kembali. Rabu kami akan jadwalkan dengan Menteri Dalam Negeri. Khusus rapat soal ini, kami akan bahas dengan Beliau. Hari Rabu jam 13.30 kami dengan Beliau.  
Iya, terima kasih.

Baik.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Yang berikutnya terkait dengan RB tematik sudah.

Terkait dengan *guiding principle*. Jadi begini, kami sekarang terus intensif, sungguh-sungguh untuk menyelesaikan soal ini.

Jadi Pak, yang terakhir tadi penting *enggak*? Bagi kami penting. Karena di daerah, kalau tidak honor, tidak ada honorer, itu di beberapa sisi lumpuh pelayanan publik Pak, karena memang ASN-nya terbatas. Oleh karena itu, kami intens dengan Pimpinan Komisi untuk mencari alternatif dan sekarang kami sedang jalan juga dengan Asosiasi Bupati se-Indonesia, dengan Asosiasi Provinsi se-Indonesia, dan juga Asosiasi Walikota se-Indonesia untuk mencari titik yang paling aman dari *guiding principle* tadi. Sehingga dengan demikian Bapak/Ibu sekalian, kami terus akan berupaya mencari titik yang paling pas penyelesaian sesuai dengan rekomendasi dan masukan Anggota Dewan tadi. Tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada PHK massal, dan juga tidak ada.

**STAF KEMENPAN RB:**

Penurunan pendapatan.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Penurunan pendapatan.

Dan ini kami sedang matangkan terus dengan Pimpinan dengan Apeksi dan Apkasi. Memang ini tidak mudah, tapi *insyaallah* kami sudah mulai kelihatan alternatif penyelesaiannya. Sehingga dengan demikian, harapan kami tidak terlalu lama juga dengan Pimpinan Dewan dan juga para Asosiasi untuk menyelesaikan ini.

Terkait dengan beberapa data yang sudah mereka dapat formasi, tetapi belum ada pengangkatan. Ini dengan beberapa keputusan di pengadilan ini memang sedang akan kita evaluasi. Sebagian ini daerah tidak mengusulkan terkait dengan formasi yang mereka perlukan. Oleh karena itu, kita sedang melakukan pendalaman Pak Ketua, dan nanti akan kami jawab secara tertulis terkait dengan *case-case* yang muncul di daerah, yang itu tidak hanya di Klaten, tapi di banyak daerah juga ada soal yang sama. Kira-kira begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Silakan.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Pak Menteri, masalah pengusulan itu karena Menteri Keuangan itu tidak menambah DAU-nya, makanya mereka tidak mau lagi peduli. Janjinya dulu kan pengangkatan pegawai oke sama DAU-nya untuk pembayaran gaji. Nyatanya Menteri Keuangan tidak melakukan itu. Oleh karena itu, tolong koordinasi dengan baik dengan Menteri itu supaya ditambah DAU untuk pembayaran gaji. Sebab itu DAU yang sudah ada saja sudah diformat penggunaannya, ini ini ini.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Beda sama kita dahulu jadi bupati. DAU-nya tidak terlalu dikunci. Sekarang sudah dikunci; pendidikan sekian, kesehatan sekian, infrastruktur sekian, sehingga tidak bisa apa-apa lagi, ya. Oleh karena itu para kepala daerah tidak dia angkat, tidak dia teruskan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Terima kasih.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Silakan.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Iya. Jadi, memang alangkah baiknya juga nanti mengundang Menteri Keuangan bersama kita, dan ini saya kira masalah kita bersama.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Terutama terkait dengan formasi di daerah.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya. Memang ujungnya Kementerian ke Menteri Keuangan. Semua hal.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Iya.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Ketua, izin Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya.

Sebelum ini menjadi *domain*-nya Menteri Keuangan. Jadi kan mumpung masih di kita. Itu kan tim dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait tenaga honorer yang terdiri dari Kementerian PAN-RB, BKN, APSI, APEKSI, APKASI. Semoga berhasil. Begitu saja Ketua. Karena tidak diajak kan kita DPR, jadi tidak perlu perubahan Undang-Undang ASN, cukup dengan tim saja.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Karena dengan Pimpinan Komisi sudah justru ini *enggak* perlu ditulis.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Bukan, bukan di situ. Maaf, Pak Menteri.

Kan ini sebenarnya esensinya yang perlu diperbaiki itu Undang-Undang ASN-nya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya iya.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Iya.

Makanya saya bilang, kalau ini tidak dibutuhkan perubahan Undang-Undang ASN, bagus, cukup selesai dengan sini. Karena kita kan masih banyak Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mau diubah. Siapa tahu ada provinisi-provinsi lain Ketua. Itu lebih cepat pembahasannya. Satu kali masa sidang ada uang uang selesainya juga kan?

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Ada gajinya, ada honornya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya. Jadi penyelesaiannya komprehensif Pak Wahyu. Jadi ada pendekatan yang apa namanya *shortcut* begitu, yang cepat. Mungkin harus itu diserahkan kepada pemerintah, tetapi itu kita juga akan menyempurnakan Undang-Undang ASN, dan itu nanti akan dalam kesimpulan.

Cukup ya?

Saya kira kita langsung masuk kesimpulan.



**F-PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):**

Izin Pimpinan. Pimpinan.

**F-PDI PERJUANGAN (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Satu menit.

**F-PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):**

Jadi untuk *me-review* saja Pak Menteri ini. Jadi, tahun 2018 itu kan sebenarnya dulu munculnya PPPK pertama kali kan sudah usulan DPR masuk ke apa DAU dari Kementerian Keuangan waktu itu, tapi pertemuan per akhirnya berbalik pertemuan di Batam. Bupati/walikota itu dikumpulkan, ketemu Menteri Keuangan akhirnya berubah, dikembalikan ke daerah. Ini awal pangkal masalah.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya.

**F-PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):**

*Nah*, sampai sekarang bermasalah lagi di daerah masyarakat menuntut PPPK duitnya *enggak* ada, DAU-nya kalau *enggak* diakomodir, dia bermasalah secara elektoral, dan sebagainya itu, jadi itu.

Yang terakhir, ini kan saya pesan betul kepada Pak Menteri, kaitannya dengan ASN yang ada, yang banyak menjabat sebagai kepala daerah, PJ.

Jadi cobalah tampilkan bedanya antara yang dipilih dengan apa namanya yang dijabat oleh ASN, karena apa? Jangan ikut permainan, pintar belanja masalah hanya kepentingan elektoral, tapi daerah pembangunannya atau peningkatan pendapatan daerah tetap rendah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya. Nanti kita evaluasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri Pak Endro.

Kita langsung ke kesimpulan.

Ada tujuh kesimpulan, ya.

Yang pertama, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan

penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 berdasarkan Pasal 99 ayat (2), PP Nomor 49 Tahun 2014, 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan catatan:

- a. Tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja masal kepada seluruh tenaga honorer;
- b. Tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini;
- c. Kebijakan yang diambil guna menghindari adanya pembengkakan anggaran;
- d. Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Ya, setuju Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Setuju?

**F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):**

Pimpinan, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya.

**F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):**

Jadi kan persoalan penyelesaian tenaga honorer terhadap batas akhir 28 November 2023. Dari Kemenpan-RB mewakili pemerintah kan meminta kesepakatan dengan kita.

Kemudian kita membuat kesimpulan seperti ini, apakah kita sudah sepakat, begitu lho.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Sudah Pak. Di pertemuan berikutnya sudah sepakat.

**F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):**

Oh begitu.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Sudah ada.

**F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):**

Jadi tidak bisa, tidak ada penundaan untuk atas nama kawan-kawan honorer?

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Sudah. Sudah, waktu itu sudah kita buat pemerintah tidak boleh memberlakukan itu kalau belum ada konsep penyelesaian.

Coba dibuka Pak.

**F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):**

Oke, baik. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Kesepaktannya juga sudah ada dulu.

**F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Setuju?

**ANGGOTA RAPAT:**

Setuju.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Jadi ini tindak lanjutnya Pak Agung. Jadi kesepakatan itu kita minta itu disertain. Konkritnya, konsepnya ini. Dengan catatan a, b, c, d. Kira-kira begitu.

**F-PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc):**

Izin Ketua.

Ini saya hanya merespon saja penulisan dari materi ini, begitu loh. Konsep kesepakatan, perlu kesepakatan di sini. Di materi ini Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Maksudnya?

**F-PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc):**

Tidak ada di sini kan perlu ada kesepakatan, begitu lho. Jadi seolah-olah dalam penyampaian tadi belum ada kesepakatan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Minta, kita ini minta supaya dikerjakan. Kira-kira begitu.

Setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Oke.

Dua, Komisi II DPR mendorong Kementerian PAN-RB segera melakukan koordinasi dengan 5 (lima) instansi yang penyampaian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga *non-ASN* dapat diumumkan sebagai data dasar dalam penyusunan *roadmap* penyelesaian tenaga *non-ASN*.

**STAF KEMENTERIAN PAN RB:**

Izin, SPTJM Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Melalui Pak Menteri.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Iya STPJM.

S-SPTJM kebalik dikit, iya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

S-SPTJM.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Iya, P-nya di. S-P. S-nya satu Pak. Iya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Oh SPTJM.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Oke.

Setuju?

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Setuju.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Oke, setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Tiga, dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN. Komisi II DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ya harus setuju, karena sudah dibahas juga di Paripurna.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Interupsi Pimpinan.

**F-P.GERINDRA (Drs. SUPRIYANTO):**

Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Silakan.

**F-P. GERINDRA (Drs. SUPRIYANTO):**

Iya sedikit.

Yang nomor 3 itu saran saya dipertegas selesainya kapan? Ini periode kemarin itu RUU ASN juga Pak Yanuar itu dibikin Pansus juga *enggak* selesai. Ini kita mau hanya apa namanya meneruskan-meneruskan terus sampai berapa periode begitu lho.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya.

Pak Wahyu.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

KemenPan-RB ini mewakili Pemerintah Republik atau berdiri sendiri Ketua? Nanti kalau dia setuju, dia untuk terakhir kali ditanya, "ya saya setuju Pak", katanya. Presiden *enggak* setuju, katanya lanjut. Ya *enggak* jadi barang ini.

Harusnya ditanya dulu dengan Pak Menteri, apakah Bapak mewakili pemerintah Republik Indonesia setuju untuk melakukan pembahasan ini. Kalau tidak setuju, tidak bisa kita tulis di sini Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Kan kita tanya ini. Kalau setuju nanti kita ketok.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Tadi saya sudah menyampaikan setuju Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Sudah, tulis saja di situ.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya, kalau 3 ini kalau *enggak* setuju berarti kan *enggak* kita ketok. Itu saja.

Setuju ya nomor 3?

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Ya sudah.

**(RAPAT: SETUJU)**

Oke.

Empat, menyadari perubahan lingkungan global yang berkembang dan cenderung tidak terprediksi, Komisi II DPR RI mendukung Menteri PAN-RB melaksanakan reformasi birokrasi tematik, khususnya di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.Pd., S.S., M.Si.):**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Setuju.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Untuk apa Ketua?

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Tadi kan ini salah satu bagian dari isi dari ASN. Terus tadi juga di sudah dipresentasikan.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Ya, ya mohon maaf Ketua. Kalau saya itu melihatnya ini nanti akhirnya malah apa namanya malah bias.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Artinya ini *enggak* perlu maksudnya?

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Iya tidak perlu menurut saya itu. Kan itu agenda dari Kementerian Kemenpan-RB. Kita tidak ada pernah membahas secara detail tentang digitalisasi administrasi pemerintahan. Kalau kita ingin memberikan dukungan terhadap digitalisasi pemerintahan, administrasi pemerintahan, ya kita bahas secara khusus tentang digitalisasi administrasi pemerintahan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Silakan yang lain.

**F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Silakan Pak Agung.

**F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):**

Ya. Kesimpulan angka empat (4) ini, rumusan redaksionalnya datang dari Kemenpan-RB atau dari Kesekretariatan Komisi II? Kalau ini bersama-sama, maka kita setuju, begitu. Tetapi kalau datang dari Kemenpan-RB, ya kita mesti kaji dulu secara detail, begitu.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya.

**F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):**

Tentang.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Menurut Pak Agung yang mewakili Komisi II, setuju apa *enggak*?

**F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):**

Saya belum setuju sama dengan Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Oke.

Setuju apa? Setuju. Setuju ada maksudnya.



**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F – PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Izin Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Bagian.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Iya.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Izin Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Iya Pak, iya.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Bagian daripada Rancangan Undang-Undang yang akan kita bahas tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu intisari justru memberikan penekanan kepada diwujudkannya digitalisasi administrasi pemerintahan. Itu yang paling utama.

Jadi, modernisasi ke depan untuk PNS itu menjadi ASN itu menjadi asisten ber-level dunia, berkelas dunia kuncinya di sini. Kalau kita tidak pakai digitalisasi, boro-boro mencapai kelas dunia. Jauh.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Izin Ketua.

Kalau ini kalau kita bercerita tentang kepentingan undang-undang, kepentingan Demokrat berbeda dengan kepentingan yang lain. Bagi kami kepentingan Undang-Undang ASN itu terkait masalah penyelesaian honorer. Yang lain menjadi tidak penting. Mau digital, mau manual, terserah, yang penting selesai urusan honorer dan PPPK.

Jadi kalau saya itu tidak melihat *urgency*-nya urusan di sini, politiknya Demokrat, tidak. Partai Demokrat penting itu bagaimana menyelesaikan masalah honorer dan PPPK.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Itu yang itu kan tadi sudah dibahas. Masukkan saja, perkara jalan apa tidak jalan nanti dihitung belakang Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Bukan, bukan. Ini bukan soal jalan *enggak* jalan, tapi kita anggap ini penting *enggak* digitalisasi administrasi pemerintahan ini? Itu problemnya.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Ya penting Pak, karena itu merupakan visi misinya.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Iya.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Dari Kementerian.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Iya, makanya itu aja pertanyaannya.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Iya, betul.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Kita anggap penting apa enggak.

Kalau kita *enggak* menganggap penting, *enggak* usah kita ambil kesimpulan.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Kita mendukung.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Kalau kita *enggak* menganggap kalau misalnya penting, bahwa kemudian nanti harus dibahas, dan ini juga nanti salah satu bagian yang akan masuk dibahas oleh ASN. Iya kan, Pak Syamsurizal ya? Soal digitalisasi ini.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.SI.):**

Izin Ketua.

Semua itu adalah bagian daripada tugas kita, termasuk juga masalah penyelesaian-penyelesaian persoalan pegawai honorer dan PPPK. Dan tadi sudah diberikan solusinya. Tidak akan ada pembengkakan anggaran, tidak akan ada pemberhentian pegawai apa tenaga honor. Dan itu *statement-statement* itu kan kita pegang Bersama. Tapi di sisi lain kita juga punya tugas yang maha jauh ke kita, termasuk dalam konsep apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bagaimana mewujudkan ASN berkelas dunia.

*Nah* itu musti terkait di dalamnya adalah reformasi merubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 itu. Jadi honorarium PPPK kita selesaikan, tapi kita bicara juga soal ASN ke depan. ASN berkelas dunia. Dan ini mesti kita lakukan perubahan undang-undang dengan reformasi birokrasi tematik, khususnya dalam hal digitalisasi, karena digitalisasi ini sudah ada juga Surat Keputusan Presiden Nomor 95 itu. Perpres Nomor 95 Tahun 2018, bahwasanya sudah ada pelaksanaan, pelaksanaan.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

SPBN.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.SI.):**

Apa?

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

SPBN.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.SI.):**

Sistem, sistem PBN -nya sudah ada, realisasi itu di pemerintahan.

Ya itu Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Oke.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Silakan Pak Gaus.

Pak Heru dulu, Pak Heru baru Pak Gaus.

**F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):**

Ya, saya melihatnya digitalisasi administrasi pemerintahan itu penting untuk menyongsong masa depan. Tetapi, permasalahan yang sekarang juga harus selesai dulu, yaitu tentang bagaimana nasib saudara-saudara kita para pegawai *non-ASN*. Saya kira itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Sebelum Pak Gaus.

Kita ini sudah nomor 4 Pak. Yang nomor satunya tadi itu sudah bicara soal penyelesaian tenaga honorer. Jadi jangan dianggap.

**F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Kita masuk nomor 4 (empat), satu dua tiganya itu hilang, begitu.

**F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Ya?

Jadi, tolong kita catat urusan Bapak/Ibu di atas itu dari nomor 1 (satu). Nomor 1 (satu) kita buat.

**F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Bukan nomor 4 (empat), bukan nomor terakhir. Dan ini perjuangan Komisi II, ya perjuangan kita semua.

*Nah* bahwa kemudian sekarang kita membicarakan tentang masa depan soal administrasi pemerintahan, ya kenapa kita tidak mendukung dengan baik saja begitu?

**F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Ya ini sedang kita bahas.

Jadi kalau Pak Endro tadi bilang, harus ada apa namanya batas waktu. Salah satu kemarin kita yang membuat mundur itu isu soal ini juga, begitu. Ini ini isunya.

Silakan Pak Gaus.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

Ya saya akan mengungkapkan apa yang Pimpinan sampaikan.

Jadi, Bapak/Ibu para *non*-ASN yang ada di atas. Hampir tiap ada pertemuan RDP antara Komisi II dengan Pak Menteri, termasuk juga Pak Menteri Tjahjo Kumolo. Tidak pernah yang tidak bicara kita tentang bagaimana para *non*-ASN harus jelas, dan sebagaimana yang saya ungkapkan tadi. Jadi saya tidak perlu perpanjang lebar.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Langsung saja.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Intinya adalah bahwa nomor satu (1) itu adalah prioritas. Kan ada nomor satu (1) kesimpulan kita.

Jadi kita berharap bagaimana penataan masa depan para ASN itu adalah suatu keniscayaan.

Yang kedua adalah kita tidak juga melupakan persoalan masa depan digitalisasi dalam rangka melakukan penataan terhadap persoalan-persoalan pemerintahan itu.

Jadi artinya Ketua, saya berbicara tentang fraksi tadi. Jadi, Fraksi PAN mendukung apa yang sudah digariskan oleh Pimpinan tadi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Iya.

Jadi kita setuju ya?

**ANGGOTA RAPAT KOMISI II DPR RI:**

Setuju.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Empat ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Nomor lima, Komisi II DPR RI dan Kementerian PAN-RB menyetujui perlu perlakuan penanganan tersendiri dan berbeda ASN legislatif atau Sekretariat Jenderal DPR RI dengan eksekutif dalam manajemen ASN keparlemenan.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Bukan ini.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Ketua, menurut saya bahasanya jangan begitu, Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Iya. Bagaimana?

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Saya setuju, tapi bahasanya tidak begitu.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Ya gimana, gimana? Usulkanlah, bagaimana?

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Begini.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Kita ikut Pak Wahyu ini.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Menyetujui pemberlakuan penanganan, penanganan tersendiri bahwasanya aturan itu tidak bisa digeneralisir seperti apa yang disampaikan oleh Rifqi tadi. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir aturan itu untuk seluruh daerah itu sama, dalam hal ini kementerian/lembaga itu sama.

Ini kan sama ceritanya dengan orang cerita apa namanya, pembagian DBHCT waktu kami memeriksa cukai rokok antara daerah penghasil dengan daerah penghasil diberlakukan sama aturannya.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Iya, langsung saja usulnya bagaimana?

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Ini maksudnya tadi adalah ini kalau terkait dengan reformasi birokrasi, tukin, kemiskinan, inflasi, Kementerian *anu* Sekretariat Jenderal DPR RI itu tidak mengurus itu.

Jadi kalau itu dikaitkan akhirnya reformasi birokrasinya terkait dengan pengurangan angka kemiskinan, tingkat inflasi, apa yang harus diurus di sini? *Eenggak* ada.

Kementerian Pertahanan? *Eenggak* ada juga. Apa bisa nurunin pertahanan itu menurunkan tingkat kemiskinan, inflasi, segala macam? Yang urusan mereka cuma urusan perang, siap perang, siap tidak perang, kan begitu kan.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Ya terus gantinya usulannya apa?

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Ya bahasanya itu jangan begitu Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Iya kayak gimana?

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Iya apa?

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Komisi II DPR RI dan Kementerian Menpan-RB setuju, menyetujui untuk tidak menggeneralisir aturan terkait apa tadi itu.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Atau perlu dibuat aturan dengan.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Izin Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Begini, begini, begini, begini.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Izin Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Silakan, silakan, silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Kita langsung saja menyebutkan apa yang tadi sudah kita sepakati dan direspon oleh Pak Menteri. Komisi II DPR RI dan Kemenpan RB mensepakati untuk penanganan secara khusus terhadap pembentukan ASN yang bertugas di parlemen. Kurang lebih begitu.

Jadi ada kekhususan yang kita buat kepada mereka-mereka yang ada di parlemen itu yang yang mana.

**F-P.DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Maksud saya begini Pak.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F – PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Akan dituangkan di dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Tunggu dulu, sebentar. Kita tanya Saudara Menteri dulu.



Ini, itu kan ada diatur dalam peraturan perundangan.

**KEMENPAN RB:**

Izin.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Silakan.

**KEMENPAN RB:**

Baik.

Kalau kami, kalau boleh, lima dan enam itu digabung Pak Ketua. Kami punya rumusan untuk menyarikan dari arahan Pimpinan dan Pak Anggota Dewan Terhormat. Jadi lima enam digabung. Kira-kira begini rumusannya.

Karena kalau tersendiri khusus, nanti *enggak* bisa, *moving-nya* *enggak* bisa mudah ASN ke tempat lain.

Jadi ini ASN di sini bisa pindah ke tempat lain. Jadi kalau diatur tersendiri nanti agak repot. Oleh karena itu, Komisi II izin, Komisi II DPR RI dan Kemenpan RB mendukung upaya reformasi birokrasi, termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekjen. Untuk itu menugaskan, menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR untuk menindaklanjuti kesepakatan ini.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Iya.

**KEMENPAN RB:**

Iya, langsung Pak Sekjen ditugaskan.

Kira-kira begitu.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Oke. Komisi II DPR RI dan Kementerian PAN-RB mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk..

**KEMENPAN RB:**

Penguatan ASN.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Iya.

**KEMENPAN RB:**

Di lingkungan Sekjen.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Tindak lanjut daripada.

**KEMENPAN RB:**

Untuk itu.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Untuk itu.

**KEMENPAN RB:**

Menugaskan Sesmenpan dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti kesepakatan ini.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Untuk mensiasati.

**KEMENPAN RB (.....):**

Ke depan.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Untuk itu menugaskan Sesmenpan dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti.

**KEMENPAN RB:**

Kesepakatan ini.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Kesepakatan.

**KEMENPAN RB:**

Atau kesepemahaman.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Menindaklanjutinya ada, itu aja.

**KEMENPAN RB:**

Ya udah, boleh.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Ya, itu.

Oke? Oke ya?

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Setuju.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Sebentar, sebentar Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Silakan silakan.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

*Enggak* itu dari dari Menteri itu. jadi, kalau Menteri sudah begitu, apalagi kita kan?

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Enggak*, jadi itu digabung. Lima, enam itu tadi digabung. *Nah*, yang enam hapus. Ya. *Nah*, itu itu harus harus di ini juga yang nomor 6 itu, ditambahin saja.

Jadi, untuk menugaskan SesMenpan dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menindaklanjutinya khusus atau termasuk lagi ya? Tadi termasuk.

Bagaimana?

*Nah* itu. Itu harus harus ada ada *stressing*-lah, ada *stressing*.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Iya iya iya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya. Oke?

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Oke.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Oke.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Enam itu *nggak* digabung dengan nomor 5, itu jadiin satu aja Ketua. Sudah dianggap cocok.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Sudah sudah sudah. Makanya.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Iya.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Itu sudah masuk Ketua, setuju jadinya.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Setuju ya?

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Ketua, apa perlu itu teknis itu apa perlu?

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Artinya harus ditindaklanjuti dengan menugaskan Sekretaris. Kesimpulan kan *enggak* perlu itu. Artinya kita sama-sama tahu sudah itu begitu.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Begini Pak Toha. Pak Toha tadi kan masih muter-muter di pesawat. Iya kan? *Nah*, jadi sebelum Pak Toha turun, kita sudah rapat tadi. Pak Sekjen DPR RI bertemu langsung dengan Pimpinan dan mungkin ini sudah mungkin lima atau enam kali, ya masalah ini disampaikan.

*Nah*, Pak Toha harus tahu bahwa teman-teman ASN di Sekretariat Jenderal kita ini Tukinnya paling kecil. Karena ada syarat yang tidak mungkin dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, harus melakukan penyederhanaan struktur, ya.

*Nah*, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu, itu yang kita minta tidak bisa diterapkan kepada semua lembaga, termasuk lembaga legislatif, karena fungsi pelayanannya berbeda. *Enggak* bisa fungsi pelayanan di kementerian disamakan dengan fungsi pelayanan di Sekretariat Jenderal DPR.

*Nah*, karena Bapak-Bapak di Sekretariat Jenderal ini mempertahankan struktur yang lama, itu menjadi kendala penilaian Kementerian PAN-RB untuk naikin Tukin. Makanya mereka ini *enggak* akan, Tukinnya kecil terus, begitu. *Nah* ini yang mau kita bantu. Kira-kira begitu. Itu Pak, riwayatnya, begitu.

Setuju ya?

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.SI.):**

Saya sepakat, isinya sepakat, begitu loh. Cuma yang redaksinya itu kok..

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Bagaimana? Redaksinya kalau masih kurang bagaimana? Yang mana yang masih harus diperbaiki?

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.SI.):**

Apakah harus, harus ada kata-kata menugaskan Sekretaris Kementerian PAN-RB ini kan sudah disimpulkan, sudah mendukung upaya reformasi birokrasi dan penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Cukup itu.

Nah itunya di belakang, di belakang layar, artinya teknisnya di belakang layar, jangan ditulis disitu.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Soalnya tadi bilang sudah ketemu, ternyata belum ketemu.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.SI.):**

Ya kalau sekarang kan sudah ketemu, tinggal bahas.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Lho ndak, selama ini udah berapa kali ketemu, tapi *enggak* sukses-sukses Pak. Sudah, kalau menurut saya *enggak* apa-apalah ini. Ya?

Oke.

**(RAPAT: SETUJU)**

Nomor enam, Komisi II DPR RI meminta Kemenpan-RB merevisi Surat Menteri PAN-RB untuk menambahkan bidang administrasi digital DPR RI dan melaksanakan.

Ini konsekuensi dari lima nanti, ya.

Jadi sebetulnya, kalau pada akhirnya kesepakatannya harus merevisi, ya harus merevisi. Tapi kalau misalnya dengan cara yang lain, dengan yang lain. Kira-kira begitu ya. Ya? Nomor enam ini kan kira-kira salah satu mungkin hasil dari pertemuan antara Sekretaris Kementerian dengan Sekjen DPR.

Silakan.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.SI.):**

Ya saya kira setuju. Nomor lima udah cukup Pak Ketua. Jadi tidak perlu nomor enam.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Ya kita *take out* saja ini ya?

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI INDONESIA (ABDULLAH AZWAR ANAS, S.PD., S.S., M.SI.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Oke.

Baik.

Bapak/Ibu Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI,

Maka dengan kita menyepakati ada lima kesimpulan pada hari ini, maka rapat ini bisa kita akhiri.

Sebelum kita tutup, tentu kami atas nama Komisi II mengucapkan terima kasih pada Saudara Menteri PAN-RB, beserta seluruh jajaran. Dan kemudian terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alamin*, maka Rapat Kerja kita pada hari ini dapat kita akhiri.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.40 WIB)**

Terima kasih.

Selamat siang,  
Salam sejahtera buat kita semua,

*Billahi taufik walhidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**a.n. KETUA RAPAT  
KABAG SET. KOMISI II,**

*a.n. hā,*

**Mahmud, S.E.  
196508021988031002**